
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2018-2023

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
BANDUNG

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum (Renstra DPU) Kota Bandung 2018-2023 dapat diselesaikan. Substansi Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Bandung Tahap II 2018-2023 khususnya bidang kebinamargaan dan sumber daya air. Penyusunan Perubahan Renstra DPU Kota Bandung Tahun 2018-2023 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen Perubahan Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan bidang pelayanan infrastruktur jalan, drainase, pengairan sungai dan penerangan jalan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung dan mendukung upaya perwujudan kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Harapan kami, Dinas Pekerjaan Umum mampu mengemban dan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan dan keberadannya memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung. Semoga Perubahan Renstra DPU Tahun 2018-2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Desember 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandung,

Ir. DIDI RUSWANDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	1-1
DAFTAR ISI.....	1-2
DAFTAR TABEL.....	1-4
DAFTAR GAMBAR	1-5
1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-3
1.4 Sistematika Penulisan	1-3
2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	2-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.1.1 Landasan Hukum.....	2-1
2.1.2 Tugas dan Fungsi.....	2-1
2.1.3 Struktur Organisasi.....	2-6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	2-1
2.2.1 Sumber Daya Manusia	2-1
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-3
2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Sebelumnya... 2-3	
2.3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra 2018-2023 sebelum Perubahan.....	2-11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	2-1
2.4.1 Daya tarik dan daya saing Kota Bandung	2-1
2.4.2 Urbanisasi dan perkembangan kawasan perkotaan Bandung Raya ..	2-2
2.4.3 Perubahan iklim dan ancaman resiko bencana	2-2
2.4.4 Desentralisasi dan otonomi daerah	2-2
2.4.5 Kapasitas Pendanaan Daerah	2-3
2.4.6 Aset Jaringan Jalan dan Sistem Drainase	2-3
2.4.7 Sumber Daya Manusia dan Organisasi	2-4
2.4.8 Peralatan, Bahan dan Teknologi Yang dimiliki.....	2-4
3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	3-1

3.1.1	Masalah Keselamatan Jalan	3-2
3.1.2	Masalah Titik Genangan	3-3
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-5
3.2.1	Identifikasi Permasalahan.....	3-5
3.2.2	Isu Strategis	3-6
3.2.3	Visi, Misi dan Program.....	3-7
3.3	Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat	3-9
3.3.1	Renstra Kementerian PUPR.....	3-9
3.3.2	Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat	3-10
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-11
3.4.1	RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031	3-11
3.4.2	KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	3-13
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	3-14
4	TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1	Visi dan Misi Kota Bandung	4-1
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-3
5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM.....	7-1
8	PENUTUP.....	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2018.....	2-1
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	2-1
Tabel 2.3	Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan	2-2
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Periode 2014-2018	2-9
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.....	2-10
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Periode Renstra 2018-2023 Pada Tahun 2019-2020	2-12
Tabel 2.7	Kondisi Jaringan Jalan di Bandung.....	2-3
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	3-1
Tabel 3.1	Status Penanganan 68 Titik Genangan di Kota Bandung	3-4
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota Bidang Infrastruktur.....	3-7
Tabel 3.3	Target Program Prioritas Kepala Daerah yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam RPJMD 2018-2023.....	3-8
Tabel 3.4	Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah DBMPR Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	3-11
Tabel 3.5	Review Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari hasil Telaahan Pustaka	3-15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	4-3
Tabel 4.2	Formulasi pengukuran indikator sasaran	4-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	5-3
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.....	6-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	7-1
Tabel 7.2	Pengukuran Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	7-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 061 Tahun 2019.	2-1
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum mulai Tahun 2022.....	2-2
Gambar 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 (dalam %)	2-6
Gambar 2.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi	2-7
Gambar 2.5 Persentase Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2014 & 2017	2-8
Gambar 5.1 Logic Model	5-2
Gambar 5.2 Logic Model Perubahan Renstra 2018-2023.....	5-1

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum (Renstra DPU) Kota Bandung 2018-2023 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Perubahan Renstra DPU adalah dokumen perencanaan Dinas PU untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat visi dan misi kota, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan penjabaran dinas lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 khususnya bidang kebinamargaan dan sumber daya air.

Selain berpedoman kepada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, penyusunan Perubahan Renstra DPU mempertimbangkan pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebinamargaan dan sumberdaya air, kinerja pelayanan DPU dalam periode lima tahun terakhir, tantangan dan peluang pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air. Pendekatan penyusunan Renstra DPU juga mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, memperhatikan keterkaitannya dengan rencana-rencana strategis dinas terkait di tingkat provinsi serta Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta memperhatikan aspirasi dan masukan para pemangku kepentingan pembangunan di kota Bandung.

Dengan besaran penduduk kota yang mencapai 2,5 juta jiwa dan fungsinya sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, kota Bandung dituntut untuk dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota. RPJMD Kota Bandung 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 menempatkan pembangunan infrastruktur, termasuk didalamnya bidang kebinamargaan dan sumberdaya air, menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk mewujudkan misi: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kota tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum sebagai Perangkat Daerah pengampu bidang kebinamargaan dan sumberdaya air. Dokumen Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas. Renstra DPU disusun untuk periode 2018-2023 sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan RPJMD Kota Bandung.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018 - 2023.
21. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam periode tiga tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 2018-2023 adalah untuk:

1. Memberikan gambaran kondisi pelayanan bidang kebinamargaan dan pengairan di kota Bandung dan kebutuhan penanganannya dalam lima tahun ke depan;
2. Menguraikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan bidang kebinamargaan dan pengairan yang menjadi prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian visi misi;
3. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kota Bandung khususnya di bidang kebinamargaan dan sumberdaya air yang menjadi tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan kewenangan), sumber daya yang dimiliki, capaian–capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan hambatan–hambatan utama yang perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab 3 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan RPJPD Kota Bandung 2005-2025, telaahan Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023, telaahan Renstra Kementerian PU, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Bab ini Mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Landasan Hukum

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1382 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung. Selanjutnya mulai Tahun 2020 peraturan ini digantikan oleh Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 061 Tahun 2019. Dengan demikian pada dua tahun pertama periode RPJMD, DPU mengalami satu kali pergantian SOTK dan selanjutnya akan kembali mengalami pergantian SOTK pada Tahun 2022.

2.1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 061 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum meliputi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum (PJU), dan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- b. Melaksanakan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup pekerjaan umum;
- d. Melaksanakan administrasi Dinas lingkup pekerjaan umum; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kewenangan yang menjadi garapan Dinas Pekerjaan Umum adalah Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi jalan umum berikut bangunan pelengkapannya; jembatan, saluran drainase jalan dan trotoar, Infrastruktur sungai termasuk bangunan pelengkapannya; bendung, bangunan pembagi, pump house, situ, kolam retensi dan jalan inspeksi, dan penerangan jalan umum.

2.1.2.1 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum meliputi

jalan dan jembatan, penerangan jalan umum (PJU), dan sumber daya air. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- b) pelaksanaan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pekerjaan umum;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pekerjaan umum; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA serta rencana kerja lainnya sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas lingkup Sekretariat, Bidang Jalan dan Jembatan, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), Bidang Sumber Daya Air, serta UPT;
- d) merumuskan kebijakan lingkup pekerjaan umum;
- e) menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup jalan dan jembatan, penerangan jalan umum (PJU), sumber daya air;
- f) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), dan sumber daya air;
- g) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, LPPD, LAKIP dan Laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- i) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi pengelolaan keuangan, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang. Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
- b) pengoordinasian bahan perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- c) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d) pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e) pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Sekretariat dan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, program kerja dan anggaran berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membina, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang;
- d) mengoordinasikan perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Dinas;
- e) mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Dinas;
- f) mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Dinas;
- g) menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- h) mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana Dinas;
- i) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) mengoordinasikan penyusunan bahan penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) mengoordinasikan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Dinas;

- l) mengoordinasikan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- m) mengoordinasikan pelayanan informasi publik;
- n) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- o) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Dinas; dan
- q) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan meliputi jalan, jembatan, median, trotoar, dan drainase. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- b) penyiapan bahan perumusan lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- c) pelaksanaan kebijakan lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang Jalan dan Jembatan;
- e) pelaksanaan administrasi lingkup Bidang Jalan dan Jembatan; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup bidang jalan dan jembatan;
- b) membina, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang jalan dan jembatan lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pemanfaatan jalan, jembatan, median, trotoar, dan drainase;
- d) mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan lingkup jalan, jembatan, median, trotoar, dan drainase;
- e) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan Jalan, jembatan, median, trotoar, dan drainase;
- f) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;

- g) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan Penerangan Jalan Umum (PJU). Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja lingkup penerangan jalan umum (PJU);
- b) penyiapan bahan perumusan lingkup penerangan jalan umum (PJU);
- c) pelaksanaan kebijakan lingkup penerangan jalan umum (PJU);
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penerangan jalan umum (PJU);
- e) pelaksanaan administrasi lingkup penerangan jalan umum (PJU); dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Penerangan Jalan Umum;
- b) membina, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pemanfaatan penerangan jalan umum;
- d) mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan lingkup penerangan jalan umum;
- e) melaksanakan pembinaan dan pengembangan konstruksi dan mutu penerangan jalan umum (PJU);
- f) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Sumber Daya Air. Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana dan program kerja lingkup sumber daya air;
- b) penyiapan bahan perumusan lingkup sumber daya air;
- c) pelaksanaan kebijakan lingkup sumber daya air;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sumber daya air;
- e) pelaksanaan administrasi lingkup sumber daya air; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

- a) merencanakan program, kegiatan dan kinerja lingkup Bidang Sumber Daya Air;
- b) membina, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Dinas agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang bina marga lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air;
- d) mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan lingkup sumber daya air;
- e) melaksanakan pembinaan dan pengembangan konstruksi dan mutu sumber daya air;
- f) memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g) melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

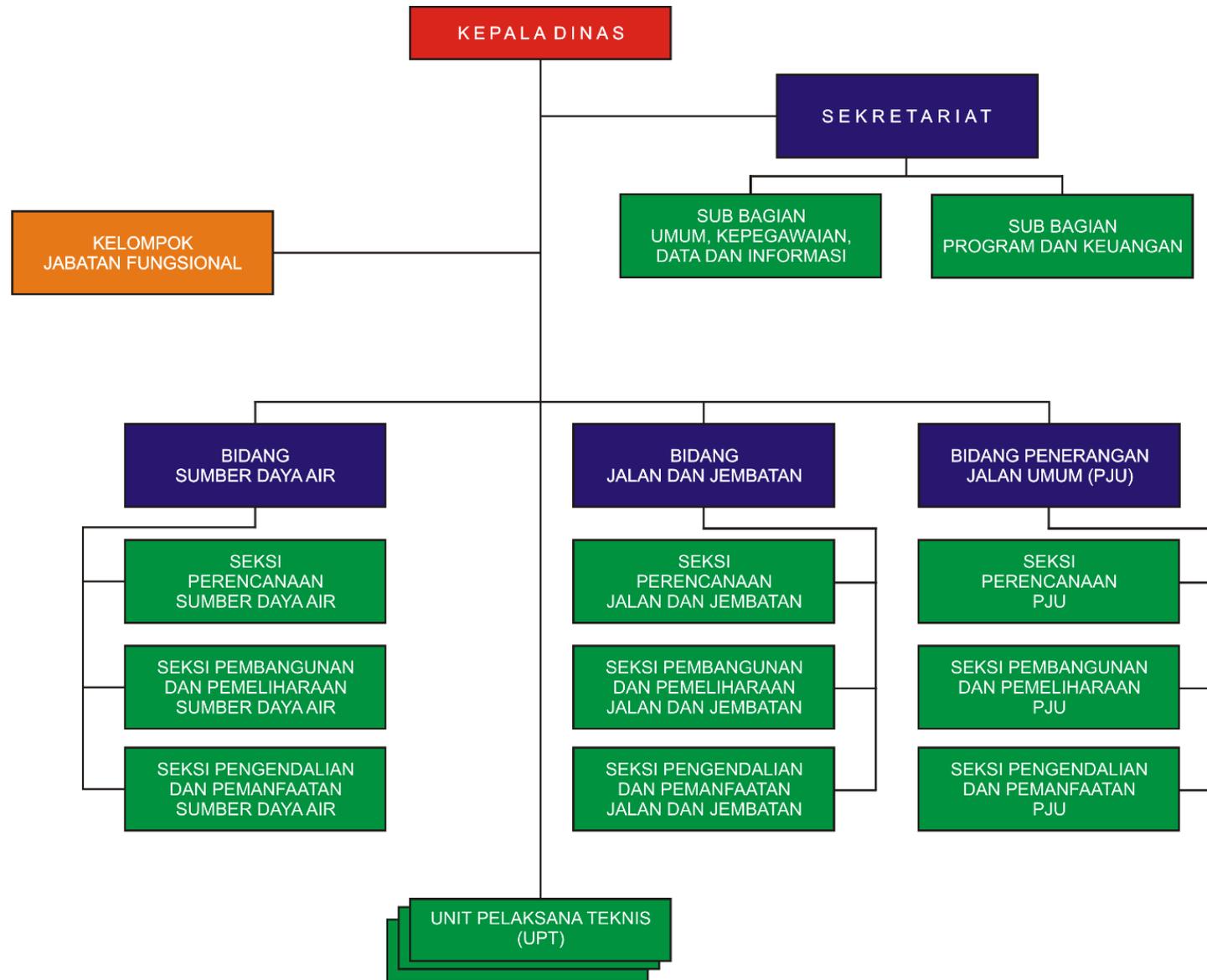
2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang berlaku saat ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

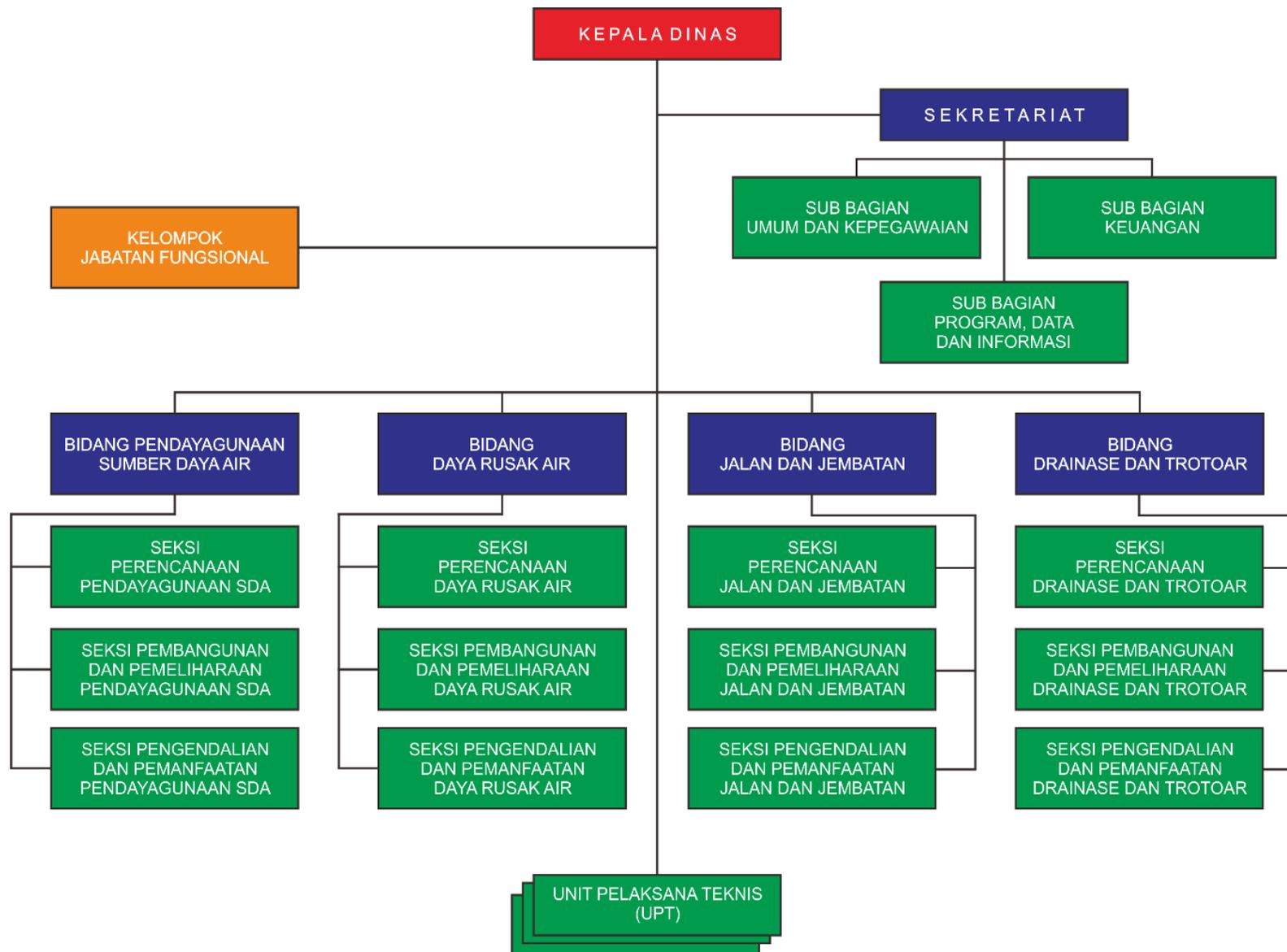
Adanya perubahan struktur organisasi pada Tahun 2019 adalah sebagai upaya peningkatan kinerja dinas dimana sebelumnya bidang dikelompokkan dengan berbasis

proses (bidang perencanaan, bidang pembangunan, bidang pemeliharaan) menjadi berbasis objek (bidang jalan dan jembatan, bidang SDA dan bidang PJU). Dengan struktur bidang berbasis objek ini maka seluruh proses pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian dapat berjalan lebih sinergis dan berkelanjutan karena berada dalam satu komando bidang yang sama.

Adanya rencana perubahan struktur organisasi pada Tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan baru terkait program dan kegiatan yakni Permendagri 90/2019 dan perubahannya pada Kepmendagri 050-5708/2020. Perubahan Struktur Organisasi yang rencananya akan mulai berlaku pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 061 Tahun 2019.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum mulai Tahun 2022

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bagian kepegawaian DPU tahun 2021 jumlah total pegawai mencapai 286 orang, dengan jumlah pejabat struktural berjumlah 22 orang dan staf pelaksana sebanyak 264 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2018

ESELON	JUMLAH
I	0
II	1
III	3
IV	18
FUNGSIONAL UMUM	
IV	3
III	112
II	135
I	14
JUMLAH	286

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan DPU yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 115 orang (40,21%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan DPU yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPU secara umum. Jumlah karyawan DPU yang menamatkan pendidikan S2 cukup besar, tercatat sebanyak 26 orang (9,09%).

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Unit Kerja	Pendidikan Akhir						Jenis Kelamin		Jumlah
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	L	P	
Bidang Jalan dan Jembatan	3	25	2	5	0	0	24	11	35
Bidang Sumber Daya Air	2	16	0	13	2	0	26	7	33
Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum	8	21	0	6	0	0	22	13	35
Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)	3	11	0	15	2	1	29	3	32
UPT Daerah Aliran Sungai	2	4	0	4	3	1	11	3	14
UPT Laboratorium Bahan Kontruksi	0	4	1	5	0	0	9	1	10
UPT Bojonegara	1	2	0	9	6	0	17	1	18
UPT Cibeunying	1	0	0	9	2	0	11	1	12
UPT Gedebage	2	2	0	13	2	1	18	2	20
UPT Karees	1	3	0	1	4	4	11	2	13
UPT Tegallega	2	1	0	5	6	1	14	1	15
UPT Ujungberung	1	2	0	10	2	2	17	0	17
UPT Peralatan dan Perbengkelan	0	3	0	12	3	1	17	2	19
UPT Produksi Campuran Aspal	0	3	0	8	2	0	13	0	13
JUMLAH	26	97	3	115	34	11	239	47	286
%	9.09	33.92	1.05	40.21	11.89	3.85	83.57	16.43	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, 2021

2.2.1.1 Aset, Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Daftar Peralatan Berat Penunjang Kegiatan Kebinamargaan

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Tahun Pembelian
1.	Excavator	Komatsu, Caterpillar	2	1991.2012
2.	Excavator Long Arm	Caterpillar	1	2014
3.	Mini Excavator	Caterpillar	1	2014
4.	Mini Excavator Full Rotary	Takeuchi	1	2016
5.	Asphalt Mixing Plant Mini	Freddy Mix	1	2004
6.	Asphalt Mixing Plant	Speco	1	2015
7.	Asphalt Finisher	Vogele	1	2016
8.	Mesin Gilas	Scheid, Barata, Bomag, HAMM, Atlas Copco	39	1974.1975.1991.2012.2013.2014.2015.2016
9.	Mesin Gilas 1 Ton	GTO, Baby Roller	2	2008.2014
10.	Mesin Gilas 4 Ton	Grace, Barata	2	1980.2007
11.	Stamper	Mikasa MTR.80 H, Tiger	8	1986.2010
12.	Mesin Gilas 2.5-4 Ton	Lister	1	1992.1995.2004.2008.2007
13.	Vibration Plate	Robin, Wracker	5	1991.1992
14.	Concrete Mixer	Dragon Globe, Cakra, Tiga Berlian	6	2003.2013
15.	Loader	JCB, Barata	2	1987.1989
16.	Loader / Bachoe	IMF, Extradig / GEHL	3	1989.2001.2008
17.	Mobil Crane	Isuzu	1	2008
18.	Forklift	Mitsubishi	1	1994
19.	Compressor	Atlas, Sullivan Palatek	2	1992.2003
20.	Generating Set	Peter	1	1988
21.	Pompa Air	Honda, EBARA, Isuzu	4	1987.1988.1992
22.	Floating Pump		1	2014
23.	Asphalt Sprayer	Anugrah	2	1984.1989
24.	Asphalt Breaker	Atlas Copco		1987.1988
25.	Concrete Vibrator	Mikasa	2	1988
26.	Circular Saw	Wracker	2	1989
27.	Stamper Plate	Honda	3	2013
28.	Carrier Truck	Isuzu	1	2013
29.	Power Pack	Atlas Copco	1	2013
30.	Mesin Pengebor Sumur Resapan	Little Beaver	2	2015.2016
31.	Pompa Water Jet	US Jetting	2	2015.2016
32.	Generator Tower Light		2	2014.2015
33.	Cold Mixing	Writgen Jerman	1	2015
34.	Truck Tangki	Hino	1	2016
35.	Mesin Bor	First	1	
36.	Compressor Angin	Swan	1	
37.	Mesin Las Listrik	Yanmar	1	1996
38.	AC Welding Transforer	Roxton	1	2006
39.	Takek	Shung Yan, Vital	2	2003.2013
40.	Treker		1	2005
41.	Kunci Pembuka Baut	Diamond, Dowidat, Fukung, Sands	3	2003.2005.2013
42.	Kunci Sok Lengkap	Diamond, Sands	2	2003.2013
43.	Gurinda Duduk		1	2003
44.	Gurinda Tangan	Hitachi	1	2013
45.	Dongkrak Hidrolik	Japan	1	2003
46.	Mata Bor Baja	Japan	1	2003
47.	Mesin Gergaji	Kingrex	1	2003
48.	Bor Listrik Tangan	Bosch	1	2003

Sumber : UPT Peralatan dan Perbengkelan, 2018

Berdasarkan kepemilikan dan jenis peralatan berat yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi tahun-tahun berikut dengan target pelayanan dan target program yang tinggi, maka diperlukan peningkatan jenis peralatan modern dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Diantaranya stamper, truk crane, mobil penyapu jalan, mobil pompa dan penyedot air.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dilihat berdasarkan capaian terhadap Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Capaian kinerja indikator pelayanan Perangkat Daerah DPU dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.4.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra Sebelumnya

2.3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2007.

a. Pelayanan Jaringan Jalan

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Bandung cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya (2013-2018), namun masih perlu peningkatan untuk mempertahankan proporsi tersebut guna mendukung pergerakan orang dan barang. Pada tahun 2013, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 68,96% meningkat menjadi 100,00% pada tahun 2018.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian pelayanan jalan antara lain adalah:

- Keterbatasan lahan, menjadi kendala untuk meningkatkan aksesibilitas karena penambahan Panjang jalan di kota menjadi terhambat.
- Jumlah kendaraan di Bandung Raya sebanyak 682.853 mobil pribadi, 30.231 unit angkot/taksi, dan 2.906.286 unit sepeda motor (data BPS 2017) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan upaya pemeliharaan jalan menjadi tantangan baru.
- Dengan keterbatasan dana pemeliharaan jalan, adanya skala prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, fungsi jalan, dan jalur angkutan umum.
- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya karena pengaruh cuaca hujan yang tidak dapat diperkirakan, dengan demikian terkadang pelaksanaan kegiatan fisik bertepatan dengan musim hujan, sehingga perbaikan jalan dilakukan berulang. Kondisi

tersebut tidak didukung oleh kondisi fisik wilayah kota Bandung sebagai daerah cekungan dengan kandungan air tanah tinggi yang dapat mempercepat kerusakan fisik jalan.

- Potensi kerusakan jalan di Bandung jauh lebih besar pada saat kondisi basah dibandingkan pada kondisi kering. Hal ini disebabkan air sering tidak tertampung dan menggenangi banyak segmen jalan, baik saluran pinggir jalan maupun saluran-saluran pembuangan lainnya.

b. Pelayanan Jaringan Drainase

Secara umum sistem drainase di Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu drainase makro dan drainase mikro. Saluran pembuangan makro adalah saluran pembuangan yang secara alami sudah ada di Kota Bandung, yang terdiri dari 15 sungai sepanjang 265,05 km. Saluran pembuangan mikro adalah saluran yang sengaja dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Namun, sekitar 30% ruas jalan belum memiliki saluran drainase sehingga beberapa daerah menjadi rawan banjir dan genangan.

Penyebab terjadinya daerah rawan banjir adalah karena tertutupnya *street inlet* oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian pelayanan jaringan drainase adalah:

- Kewenangan penanganan wilayah sungai oleh DPU hanya Ordo 3 dan Ordo 4, sedangkan Ordo 2 dan 1 merupakan kewenangan provinsi dan BBWS.
- Penanganan banjir/genangan tidak dapat diselesaikan secara partial, harus menyeluruh dari hulu hingga hilir sesuai dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan memerlukan dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan dan konstruksi.
- Pembebasan lahan yang belum tuntas berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Perilaku masyarakat yang belum sadar kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3), berdampak pada meningkatnya sedimentasi saluran akibat sampah dan berakibat terjadinya genangan dan banjir.
- Partisipasi sebagian masyarakat dalam melakukan kebersihan saluran/kali di sekitar rumahnya dikarenakan kurangnya kepedulian dan terlalu mengandalkan peran pemerintah.

c. Pelayanan Penerangan Jalan Umum

Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara setiap tahun terealisasi melebihi target. Jumlah PJU yang dipelihara ditargetkan sebanyak 2.300 titik PJU/tahun, sedangkan rata-rata realisasinya sebanyak 8.246 titik PJU/tahun (358,2%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian pelayanan penerangan jalan umum adalah:

- Ketersediaan dana dalam hal penambahan jaringan titik lampu dan pembatasan daya listrik/ meterisasi PJU oleh PT. PLN sehingga pembangunan jaringan PJU baru dapat direalisasikan secara optimal.
- Tingkat vandalisme (pencurian dan pengrusakan) yang cukup tinggi, pada umumnya lampu PJU mempunyai lifetime selama 10.000 jam (3 tahun), realita di lapangan banyak lampu mati sehingga perlu diantisipasi penyebab padamnya lampu.
- Penggunaan energi alternatif dengan teknologi solar cell / tenaga matahari belum dapat dilaksanakan karena perlu anggaran awal yang cukup besar namun penggunaan lampu berteknologi LED mampu memberikan solusi alternatif penghematan energi.

2.3.1.2 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana minimal mencapai indikator dan tingkat nilai pada batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. SPM bidang pekerjaan umum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berlaku untuk capaian sampai tahun 2019. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Bagian Keempat Pasal 7 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak ada satupun yang berkenaan dengan DPU. Oleh karena itu, DPU sedang menunggu PermenPU yang baru atau perubahan PP No. 2 tahun 2018 agar indikator SPM dapat ditetapkan.

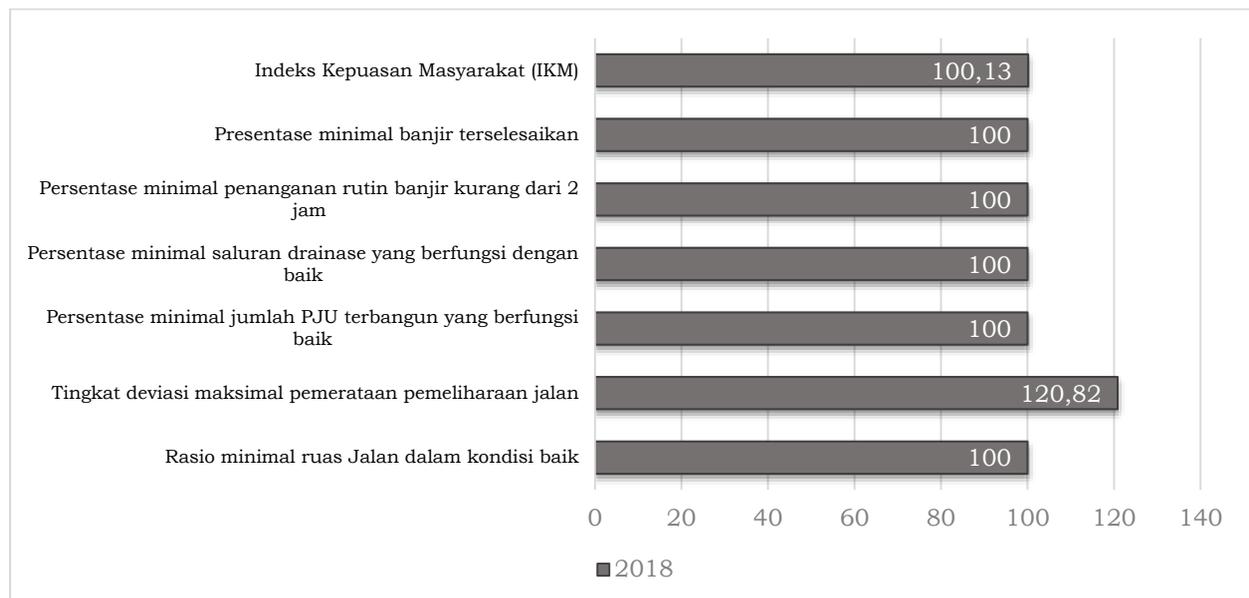
2.3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan yang menjadi mandatnya. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: 050/Kep.966-Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam Tabel.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2018 sudah mencapai target yang ditetapkan.



Gambar 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 (dalam %)

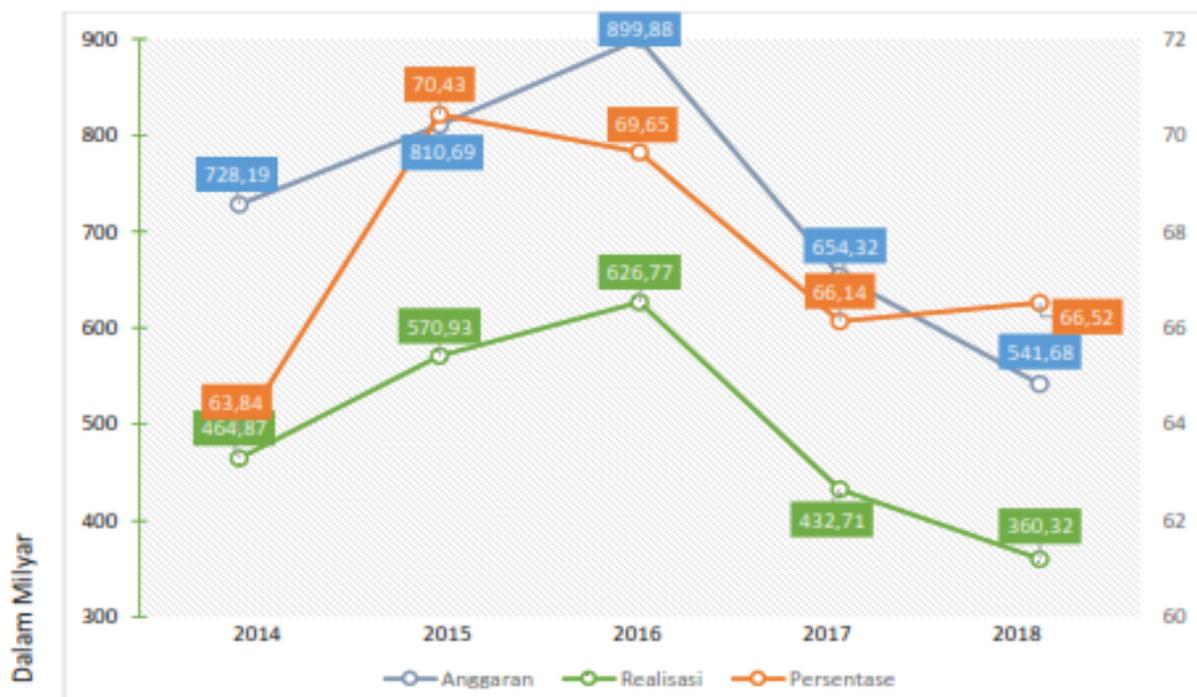
Capaian IKU DPU yang telah mencapai target diatas disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Semakin akuratnya penetapan target untuk masing-masing program dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- Tersedianya data dan informasi akurat mengenai kondisi dan kebutuhan untuk masing-masing program beserta IKU-nya;
- Penambahan alokasi anggaran dari yang direncanakan dapat terealisasi.

2.3.1.4 Kinerja Keuangan

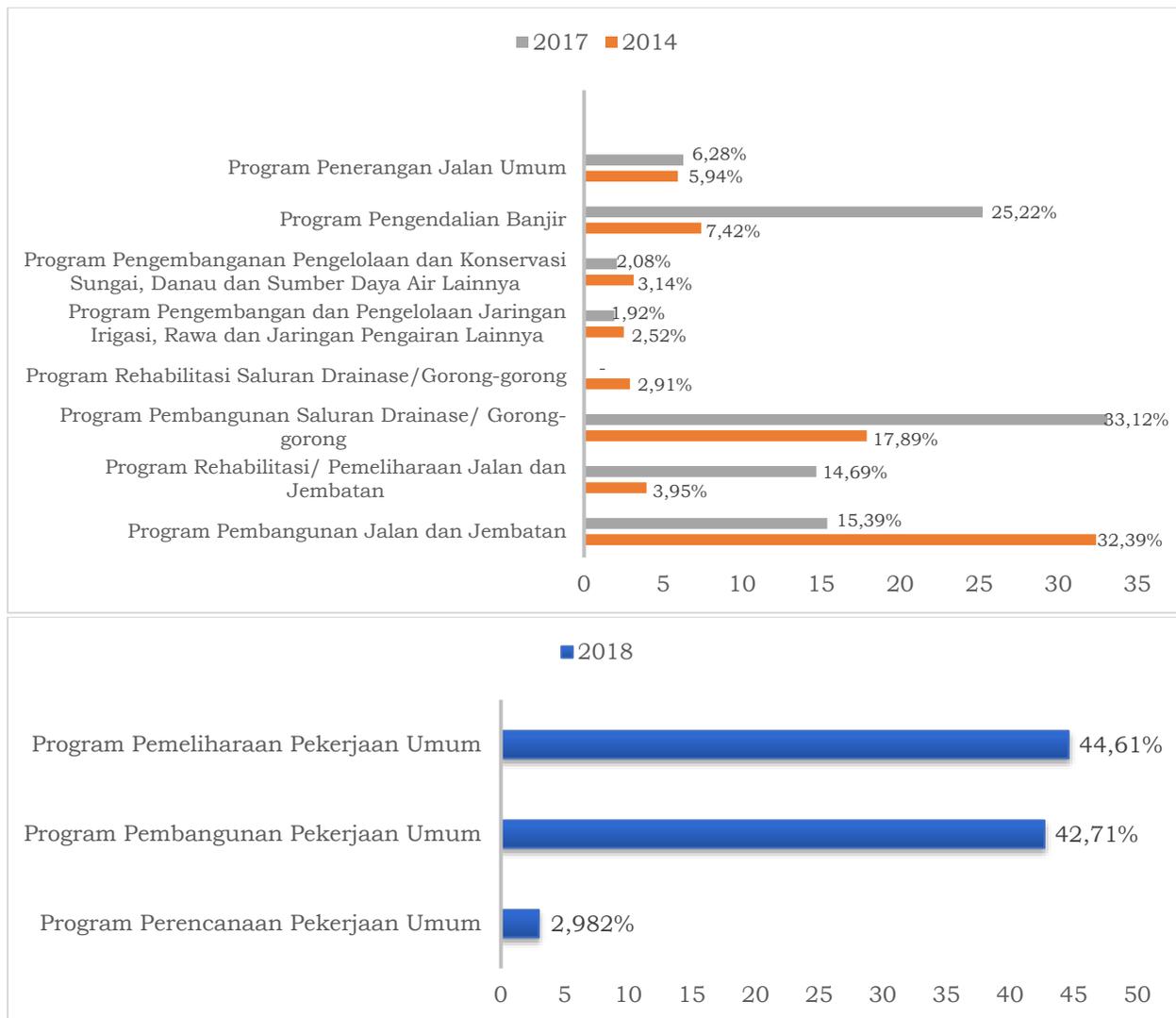
Total alokasi anggaran Urusan Pekerjaan Umum bidang kebinamargaan dan pengairan pada periode tahun 2014-2018 adalah sebesar Rp.3.634.759.311.894,80 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.455.593.919.407,00 dengan rata-rata realisasi anggaran

berkisar 67,55%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh DPU yaitu: i) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, ii) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, iii) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, iv) Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-gorong, v) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, vi) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, vii) Program Pengendalian Banjir dan viii) Program Penerangan Jalan Umum. Pada tahun 2018 seiring dengan perubahan nomenklatur pada tahun 2016 lalu, DPU merampingkan program menjadi 3 (tiga) yaitu: i) Program Perencanaan Pekerjaan Umum, ii) Program Pembangunan Pekerjaan Umum, dan iii) Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum.



Gambar 2.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi Periode 2014-2018

Berdasarkan perhitungan tahun 2018, proporsi anggaran untuk Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum paling besar mencapai 44,61%, diikuti Program Pembangunan Pekerjaan Umum sebesar 42,71%. Sedangkan program-program lainnya realisasinya rata rata dibawah 7,1%. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.



Gambar 2.5 Persentase Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2014 & 2017

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Periode 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	Indikator SPM Berdasarkan Permen PU No. 1/PRT/M/2014																	
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang.	%	60	75	85	100	100	100	81,30	91,22	100	100	100	108,4	107,32	100	100	100
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Kinerja Utama (IKU)																	
1.	Tingkat minimal keterbangunan Infrastruktur Jalan di PPK Gedebage	%		35,17	63,30	75,54	-	-	24,46	52,60	66,54	-	-	69,55	83,10	88,10	-	-
2	Rasio minimal ruas Jalan dalam kondisi baik	%		75	85	100	100	100	83,29	91,22	100	100	100	111,05	107,32	100	100	100
3	Indeks aksesibilitas jalan	skala		7,42	7,44	7,45	7,47	7,48	7,41	7,42	7,42	7,47	7,48	99,87	99,73	99,73	100	100
4	Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	%		20	20	20	20	20	17,56	10,38	14,50	13,64	15,84	112,19	148,08	127,52	131,78	120,82
5	Persentase minimal jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	%		55	80	100	100	100	56	83,27	96,91	100	100	101,82	104,09	96,91	100	100
6	Persentase minimal saluran drainase yang berfungsi dengan baik	%		70	80	100	100	100	58,46	81,24	91,22	100	100	83,51	101,55	91,22	100	100
7	Persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam	%		47	74	100	100	100	44,11	64,70	85,29	97,06	100	93,85	87,43	85,29	97,06	100
8	Persentase minimal banjir terselesaikan	%		0	10	70	100	100	-	2,94	40	90	100	-	29,40	57,14	90	100
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai		70	70	75	80	85	40,7	75	75	93,75	85,11	58,14	107,14	100	93,75	100,13

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Periode 2014-2018

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					% Anggaran pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program pembangunan jalan dan jembatan	321.925.499.603	285.074.218.897	322.075.500.000	69.349.115.434	-	208.903.981.669	204.952.558.301	204.137.307.647	44.095.911.509	-	64,89	71,89	63,38	63,59	-
2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-	128.024.254.251	206.809.949.580	243.077.658.000	177.331.632.226	-	62.015.132.722	105.480.486.931	181.953.043.719	118.442.709.153	-	48,44	51,00	74,85	66,79	-
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	43.844.222.198	35.499.244.340	34.625.865.000	109.535.444.734	-	25.102.643.689	39.906.917.779	31.423.929.212	61.378.107.437	-	57,25	112,42	90,75	56,03	-
4	Program perencanaan pembangunan daerah	-	-	200.000.000	-	-	-	-	46.724.200	-	-	-	-	23,36	0,00	-
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	19.670.879.964	18.900.823.035	17.600.000.000	12.008.523.500	-	11.541.156.630	23.235.422.532	10.140.156.821	5.116.428.657	-	58,67	122,93	57,61	42,61	-
6	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	20.819.133.000	30.818.325.261	29.425.000.000	3.051.629.706	-	9.994.140.695	24.990.868.172	26.018.560.286	2.343.952.006	-	48,00	81,09	88,42	76,81	-
7	Program Pengendalian Banjir	56.462.680.431	70.117.312.566	108.100.000.000	156.217.141.674	-	41.254.699.575	36.363.016.901	67.784.865.658	84.614.347.092	-	73,07	51,86	62,71	54,16	-
8	Program Penerangan Jalan Umum	57.448.950.480	88.786.996.306	93.116.087.197	61.243.507.267	-	36.616.654.330	82.259.638.922	63.990.719.100	54.917.671.767	-	63,74	92,65	68,72	89,67	-
9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	33.210.208.340	23.550.000.000	17.828.335.000	2.332.135.420	-	31.151.956.310	36.708.789.513	16.687.635.378	2.148.829.200	-	93,80	155,88	93,60	92,14	-
10	Program Perencanaan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	16.151.268.260	-	-	-	-	9.304.009.339	-	-	-	-	57,61
11	Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	279.973.716.203	-	-	-	-	217.899.974.854	-	-	-	-	77,83
12	Program Pembangunan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	231.380.137.637	-	-	-	-	119.635.848.941	-	-	-	-	51,71
	JUMLAH	681.405.828.267	759.556.869.985	866.048.445.197	591.069.129.961	527.505.122.099	426.580.365.620	553.897.699.051	602.182.942.021	373.057.956.821	346.839.833.134	62,60	72,92	69,53	63,12	65,75

2.3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra 2018-2023 sebelum Perubahan

Pelayanan Perangkat Daerah Periode Renstra 2018-2023 telah berjalan selama 2 (dua) tahun. Pencapaian kinerja pelayanan pada Tahun 2019-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Seperti terlihat pada tabel tersebut, terdapat perbedaan indikator dan target kinerja yang digunakan pada Tahun 2019 dan 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang diselaraskan dengan perubahan SOTK yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 061 Tahun 2019.

Dari tabel dapat dilihat beberapa target yang tidak tercapai, yakni:

1. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2020 terealisasi sebesar 91,87%, atau capaian 97,73% dari target sebesar 94%.
2. Luasan trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 410145 m², atau capaian 96,84% dari target sebesar 618402 m².
3. Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 604764 m¹, atau capaian 97,79% dari target sebesar 618402 m¹.
4. Jumlah PJU dalam kondisi baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 46790 titik, atau capaian 95,49% dari target sebesar 49000 titik.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2019-2020 dapat dikategorikan baik dimana capaian kinerja lebih dari 90%. Namun demikian capaian kurang dari 100% ini menyebabkan perlunya evaluasi dan perencanaan lebih lanjut agar capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung Periode Renstra 2018-2023 Pada Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				1 (2019)	2 (2020)	1 (2019)	2 (2020)	1 (2019)	2 (2020)
1	Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	%	100	100	-	100	-	100,00%	-
2	Prosentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di Implementasikan	%	100	100	-	100	-	100,00%	-
3	Prosentase Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum terbangun	%	100	100	-	100	-	100,00%	-
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	92	-	94	-	91,87	-	97,73%
5	Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/ underpass)	unit	3	-	1	-	1	-	100,00%
6	Luasan trotoar dalam kondisi baik	M2	397535	410535 (+13000)	423535 (+13000)	407352 (+9817)	410145 (+2793)	99,22%	96,84%
7	Panjang drainase dalam kondisi baik	M1	602402	610402 (+8000)	618402 (+8000)	603434 (+1032)	604764 (+1330)	98,86%	97,79%
8	Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	120	100	80	63,3	60,76	136,70%	124,05%
9	Jumlah PJU dalam kondisi baik	titik	44000	46500 (+2500)	49000 (+2500)	45613 (+1613)	46790 (+1177)	98,09%	95,49%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan bidang kebinamargaan dan sumber daya air di kota Bandung dalam lima tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2014-2018 dan telaahan terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan RTRW, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah DPU dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

2.4.1 Daya tarik dan daya saing Kota Bandung

Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi Jawa Barat sekaligus pusat jasa dan perdagangan merupakan daerah tujuan wisata dengan daya tarik tersendiri baik wisata alam, sejarah, kuliner maupun belanja. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara datang berkunjung ke kota Bandung hampir setiap akhir pekan. Dalam konteks global, kota Bandung menjadi bagian dari jejaring kota-kota internasional yang semakin terkoneksi satu sama lain seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini menguatkan pentingnya memperhatikan aspek daya saing kota sebagai konsekuensi logis dari perkembangan dunia yang semakin global dan terbuka.

Dengan semakin terbukanya ekonomi dan persaingan serta semakin dominannya peran kota sebagai penggerak ekonomi negara telah merubah konsep dan pendekatan kota dalam memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitifnya menuju peningkatan kinerja ekonomi kota secara keseluruhan. Terdapat tiga keunggulan berkaitan dengan daya saing kota yang dapat meningkatkan berbagai alat kebijakan dan perubahan dalam strategi dan rencana pengembangan ekonomi, pendidikan, kemitraan pemerintah swasta dan pembangunan infrastruktur kota.

Ketersediaan dan kinerja infrastruktur jalan dan sumber daya air yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik dan daya saing daerah. Salah satu kriteria daya saing daerah yang menjadi acuan investor untuk menanamkan modalnya di suatu wilayah adalah keberadaan dan kualitas infrastruktur. Banyak kajian mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan berkualitas rendah memberikan pengaruh bagi investor dalam memutuskan rencana dan lokasi investasi.

Dengan demikian tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan sumberdaya air adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing kota Bandung dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik.

2.4.2 Urbanisasi dan perkembangan kawasan perkotaan Bandung Raya

Secara umum, Indonesia mengalami urbanisasi yang pesat selama tiga dekade terakhir dan akan terus meningkat di waktu mendatang. Penduduk perkotaan Indonesia tumbuh 2,75% per tahun sejak tahun 2000 hingga 2010. Diperkirakan penduduk perkotaan akan mencapai 66,6% dari jumlah penduduk pada tahun 2035, atau bertambah sebanyak 3,4 juta jiwa per tahun dalam kurun waktu 2010 hingga 2035.

Begitu pula yang terjadi di Kota Bandung sebagai pusat kegiatan perkotaan untuk wilayah sekitarnya mengalami penambahan jumlah penduduk meskipun dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil karena berkembangnya wilayah hinterland di sekitarnya. Diperkirakan penduduk pada tahun 2018 mencapai 2,6 juta jiwa. Perkembangan kawasan perkotaan di sekitar kota Bandung akan terus meningkat seiring dengan peningkatan harga lahan di pusat kota yang menyebabkan lokasi-lokasi perumahan bergeser keluar kota Bandung.

Dengan berkembangnya kawasan perkotaan maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana penyediaan infrastruktur yang efisien dalam meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah kota dan merata bagi semua lapisan masyarakat di perkotaan.

2.4.3 Perubahan iklim dan ancaman resiko bencana

Pemanasan global yang terjadi dipengaruhi oleh kegiatan manusia dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan secara signifikan jika tidak ada upaya untuk menanganinya. Dampak yang dirasakan saat ini adalah terjadinya perubahan iklim dan peningkatan frekuensi dan variabilitas iklim. Meskipun dampak yang dirasakan tidak sebesar kota-kota di kawasan pesisir pantai, perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan wilayah di Kota Bandung terhadap ancaman bencana seperti banjir akibat hujan yang berkepanjangan dan menyebabkan longsor di beberapa lokasi sehingga berdampak pada terputusnya jaringan transportasi jalan yang ada.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sistem dan disain jaringan jalan, sistem drainase dan pengendalian banjir serta penerangan jalan umum di kota Bandung dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap dampak perubahan iklim dan ancaman resiko bencana.

2.4.4 Desentralisasi dan otonomi daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Otonomi daerah secara konkret saat ini memungkinkan daerah melakukan inovasi. Yakni secara tidak langsung akan mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi baru yang dapat mendukung pelaksanaan urusan pemerintah pusat

dan pembangunan sehari-hari terutama dari sisi ekonomis serta penciptaan metode pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sebagai pembayar pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak pembangunan dimana mereka akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta akan dapat mencari jawaban bagi pemecahannya.

Tantangan pembangunan bidang kebinamargaan dan pengairan dalam era otonomi daerah adalah bagaimana mendorong kemandirian daerah secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi tetap perlu dilakukan mengingat sifat infrastruktur jalan dan pengairan yang lintas wilayah.

2.4.5 Kapasitas Pendanaan Daerah

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan penyediaan infrastruktur perkotaan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kementerian teknis belum secara sukarela melimpahkan kewenangan yang seharusnya sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi kewenangan ke daerah belum diikuti alokasi dana yang jelas untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan pinjaman atau kerjasama luar negeri langsung tanpa melalui pemerintah pusat. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan sumber pendanaan pembangunan infrastruktur kota dan meningkatkan alokasi anggaran program pembagunan infrastruktur kota.

2.4.6 Aset Jaringan Jalan dan Sistem Drainase

Pada akhir tahun 2018, total panjang jaringan jalan yang ada di kota Bandung mencapai kurang lebih 3.000 km. Jika diasumsikan rata-rata nilai aset Jalan Kota sebesar Rp 5 Milyar/km, maka total nilai aset jalan yang ada saat ini berjumlah Rp. 15 Trilyun. Seluruh panjang jaringan jalan tersebut merupakan aset yang perlu dipelihara untuk mempertahankan kondisi dan tetap fungsional.

Tabel 2.7 Kondisi Jaringan Jalan di Bandung

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (dalam %)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	68,96	83,29	91,22	100	100	100
2	Pembangunan PJU	221,3	56	83,27	96,91	100	100
3	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	60	58,46	81,24	91,22	100	100

Begitu pula dengan jaringan sistem drainase mikro yang dibuat mengikuti pola jaringan jalan. Apabila 70% ruas jaringan jalan di kota Bandung memiliki saluran drainase,

maka ada sekitar 2.000 km saluran drainase mikro. Jika diasumsikan nilai aset rata-rata saluran drainase mikro sebesar Rp. 1 Milyar/km maka nilai aset saluran drainase mikro yang ada sebesar Rp. 2 Trilyun.

2.4.7 Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Dengan jumlah pegawai sebanyak 335 orang yang tersebar di 14 unit kerja merupakan aset yang berharga dalam penyelenggaraan pelayanan.

2.4.8 Peralatan, Bahan dan Teknologi Yang dimiliki

Ketersediaan peralatan yang ada unit kerja banyak yang sudah mengalami penyusutan. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan bahan-bahan yang memenuhi standar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan standardisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada.

3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum (Sumber: permendagri 86/2007). Pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Keselamatan Jalan	Belum meratanya kemantapan jalan	Meningkatnya kerusakan kondisi jalan akibat banjir cileuncang
			Menurunnya kondisi jalan akibat beban lalu lintas dan umur layan
		Belum meratanya ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman, berkeselamatan dan ramah disabilitas	Belum terbangunnya trotoar sesuai kriteria di jalan-jalan utama secara merata
			Masih adanya trotoar dalam kondisi rusak yang perlu direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya
		Belum meratanya cakupan PJU menyala	Masih adanya ruas jalan yang belum dilengkapi PJU dalam jumlah memadai
			Masih adanya titik PJU padam
2	Titik Genangan	Belum tuntasnya penanganan 68 titik genangan	Kurangnya kapasitas sungai
			Tingginya volume sampah dan sedimentasi di badan sungai
			Terjadinya banjir kiriman akibat kurangnya resapan di kawasan hulu
			Kurangnya ketersediaan kolam-kolam retensi sebagai parkir air

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurangnya ketersediaan rumah pompa untuk redistribusi genangan
		Belum optimalnya fungsi saluran untuk mengatasi banjir cileuncang	Kurangnya kapasitas saluran drainase jalan
			Tingginya volume sampah dan sedimentasi di saluran drainase
			Tertutupnya tali-tali air menuju saluran samping jalan

3.1.1 Masalah Keselamatan Jalan

Kondisi jalan yang berkeselamatan merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dicapai dalam mewujudkan Bandung Nyaman. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan kondisi jalan yang berkeselamatan ini adalah dalam hal tersedianya jalan dalam kondisi mantap, tersedianya fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas dan meratanya cakupan PJU dalam kondisi menyala.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Tingkat kemantapan jalan pada Akhir Tahun 2020 sebesar 91,87%, atau capaian sebesar 97,73% dari target sebesar 94%.

Ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas mendukung terwujudnya jalan yang berkeselamatan, terwujudnya Bandung Nyaman, dan merupakan salah satu pendukung tercapainya program prioritas kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 yakni fasilitas disabilitas di semua ruang publik. Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini adalah dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan trotoar. Luasan trotoar dalam kondisi baik pada tahun 2020 terealisasi sebesar 410145 m², atau capaian 96,84% dari target sebesar 618402 m².

Penerangan Jalan merupakan perlengkapan jalan yang sangat penting dalam mewujudkan jalan yang berkeselamatan. Meratanya ketersediaan penerangan jalan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan. Namun demikian realita di lapangan menunjukkan masih adanya penerangan jalan dalam kondisi padam di malam hari. Oleh karena itu dalam mengukur keberhasilan pelayanan penerangan jalan, cakupan PJU menyala menjadi tolok ukur yang jauh lebih penting karena tidak hanya melihat dari aspek kuantitas tapi juga kualitas layanan penerangan jalan. Pada pertengahan

Tahun 2021, telah dilaksanakan pendataan kondisi PJU untuk mengetahui cakupan PJU menyala pada akhir 2020. Dari pendataan tersebut diketahui bahwa cakupan PJU menyala eksisting sebesar 90,96% yakni 40.973 titik menyala dari 45.507 titik.

3.1.2 Masalah Titik Genangan

Limpasan air di badan jalan akibat air hujan atau seringkali disebut banjir cileuncang. Penyebab terjadinya banjir cileuncang adalah karena tertutupnya street inlet oleh beberapa aktivitas sehingga air hujan tidak bisa masuk ke dalam saluran drainase, adanya pendangkalan di beberapa bagian saluran, konstruksi drainase yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, berkurangnya kapasitas sungai dan drainase akibat sedimentasi dan sampah, belum tersedianya fasilitas kolam retensi/parkir air dengan kapasitas memadai, deforestasi kawasan resapan, serta pengalihfungsian lahan dari kondisi alami menjadi lahan dengan fungsi komersil seperti pertokoan, mall, jalan, perumahan, dan lain-lain sehingga tutupan lahan pun berubah yang meningkatkan debit limpasan. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan. Genangan terjadi karena air hujan yang tidak terserap tanah kemudian menggenang, terkumpul di suatu tempat dan tidak mengalir karena elevasi lebih rendah dari sekitarnya.

Kinerja penanganan banjir/genangan berdasarkan karakteristik genangan yang diantaranya didasarkan pada lama genangan, tinggi genangan dan lokasi genangan. Telah teridentifikasi sebanyak 68 titik genangan di Kota Bandung yang masih berpotensi terjadi genangan. Selama periode tahun 2106 hingga tahun 2020, indikator kinerja penanganan banjir/genangan mengalami beberapa perubahan indikator kinerja. capaian kinerja penanganan banjir/genangan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan parameter pengukuran lama genangan selama 120 menit dan tinggi genangan 30 cm, terus mengalami peningkatan dari yang semula persentase minimal penanganan rutin banjir kurang dari 2 jam sebesar 85,29% (2016), naik menjadi 100% (2018), begitu pula dengan persentase minimal banjir terselesaikan dari semula sebesar 40% (2016), naik menjadi 100% (2018). Namun pada tahun 2019 terdapat perubahan indikator kinerja menjadi lama genangan yang tertangani pada titik genangan, dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata lama genangan adalah selama 63,30 menit (2019) dan 60,76 menit (2020), dengan rata-rata ketinggian genangan mencapai 31,36 cm. Dengan demikian titik genangan telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

Selanjutnya mulai tahun 2021 hingga akhir periode Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan penanganan genangan ditetapkan dengan parameter tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Berdasarkan kriteria ini, dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan sudah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.

Tabel 3.2 Status Penanganan 68 Titik Genangan di Kota Bandung Tahun 2020

No.	Lokasi Genangan/Cileuncang	Tinggi (cm)	Durasi (menit)	Status
1	Jl. Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat)	30,00	45,00	Selesai
2	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisolatri)	30,00	40,00	Selesai
3	Jl. Raya Sudirman (Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	25,00	45,00	Selesai
4	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasir Koja ke arah gerbang Tol	30,00	60,00	Selesai
5	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	20,00	30,00	Selesai
6	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	20,00	30,00	Selesai
7	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	10,00	20,00	Selesai
8	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	20,00	30,00	Selesai
9	Jl. Moch. Toha - Sal. Ciplasari / Sal. Ciateul	30,00	60,00	Selesai
10	S. Cirangrang	30,00	45,00	Selesai
11	Jl. A.H. Nasution S. Cikiley	30,00	60,00	Selesai
12	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	30,00	30,00	Selesai
13	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	20,00	30,00	Selesai
14	Jl. Cilengkrang II Sal. Ciplasari	10,00	20,00	Selesai
15	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	20,00	30,00	Selesai
16	Sal. Babakan Dese Antara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	20,00	30,00	Selesai
17	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	30,00	45,00	Selesai
18	S. Ciroyom Jl. Kopo	30,00	60,00	Selesai
19	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	20,00	30,00	Selesai
20	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	25,00	30,00	Selesai
21	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	20,00	30,00	Selesai
22	Perumahan Riung Bandung Jl. Braga	30,00	45,00	Selesai
23	Terminal Leuwipanjang	30,00	90,00	Belum Selesai
24	Jl. Pagarsih - S. Citepus	30,00	120,00	Belum Selesai
25	Jl. Cibodas - antapani	35,00	50,00	Belum Selesai
26	Persimpangan Jl. Pasirkoja - Sal. Cilimus I	35,00	60,00	Belum Selesai
27	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	35,00	60,00	Belum Selesai
28	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	50,00	200,00	Belum Selesai
29	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	-	-	Belum Selesai
30	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	40,00	70,00	Belum Selesai
31	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	80,00	200,00	Belum Selesai
32	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	-	-	Belum Selesai
33	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	Belum Selesai
34	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	Belum Selesai
35	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	Belum Selesai
36	Jl. Kopo - Sal. Citarip	40,00	120,00	Belum Selesai
37	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	Belum Selesai
38	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	Belum Selesai
39	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	-	-	Belum Selesai
40	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	Belum Selesai
41	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	-	-	Belum Selesai
42	Pasar Sederhana Sal. Cikalintu	-	-	Belum Selesai
43	S. Cikapundung Kolot - belakang BSM	-	-	Belum Selesai
44	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	Belum Selesai
45	S. Cibunut - Baranangsiang	-	-	Belum Selesai
46	Sal. Lebak larang - UNPAD	-	-	Belum Selesai
47	Jl. Nilem	-	-	Belum Selesai
48	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	Belum Selesai
49	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	Belum Selesai
50	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	Belum Selesai
51	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	Belum Selesai
52	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	-	-	Belum Selesai
53	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	Belum Selesai
54	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	Belum Selesai
55	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	Belum Selesai
56	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	Belum Selesai
57	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	Belum Selesai
58	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	-	-	Belum Selesai
59	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	40,00	70,00	Belum Selesai
60	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	-	-	Belum Selesai
61	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	Belum Selesai
62	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	-	-	Belum Selesai
63	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	Belum Selesai
64	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	Belum Selesai
65	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	Belum Selesai
66	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	90,00	120,00	Belum Selesai
67	S. Cipagalo	-	-	Belum Selesai
68	S. Cipariuk	-	-	Belum Selesai

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1 Identifikasi Permasalahan

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan merupakan pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam tiga tahun sekaligus penjabaran RPJPD Kota Bandung Tahap III. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum, di dalam RPJMD telah mengidentifikasi permasalahan pokok pembangunan yaitu **masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur** yang akan diselesaikan dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penurunan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan dan urusan non perhubungan;
- Optimalisasi kemantapan jalan;
- Peningkatan fungsi sarana prasarana penurunan genangan; dan
- Peningkatan fungsi saluran drainase jalan.

Masalah pokok infrastruktur tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Aspek Daya Saing: Penanganan Genangan dan Kemacetan Belum Optimal.**

Permasalahan penanganan banjir/genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Berdasarkan karakteristik genangan, parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan adalah ketinggian 30 cm dengan waktu surut 60 menit. Dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan sudah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.

Permasalahan dari penanganan genangan yang belum optimal adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah.

Kemacetan di Kota Bandung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Bandung yang dirasakan saat ini tidak hanya di jalan raya, melainkan juga ketika jalan di lingkungan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa kemacetan di Bandung telah menjadi permasalahan kota yang perlu mendapatkan perhatian serius, yang bukan hanya karena banyaknya jumlah wisatawan datang ke Bandung setiap akhir pekan

atau di masa-masa liburan. Permasalahan kemacetan juga disebabkan dari penambahan populasi penduduk yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, meningkatnya jumlah pengguna kendaraan pribadi yang tidak diiringi dengan penambahan kapasitas jalan. Menjadi destinasi wisata bagi para pelancong dari luar kota juga merupakan faktor penyebab kemacetan Kota Bandung.

2. Aspek Pelayanan Umum:

- a. **Peningkatan Kemantapan Jalan.** Berdasarkan survey kondisi jalan yang dilaksanakan pada tahun 2020, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung mencapai 91,8%. Dengan demikian maka masih terdapat 8,13% panjang jalan dalam kondisi tidak mantap, sehingga masih membutuhkan peningkatan kemantapan jalan.
- b. **Permasalahan penanganan banjir/genangan** di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah. Hingga tahun 2020, telah teridentifikasi sebanyak 68 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan berdasarkan karakteristik genangan. Parameter pengukuran banjir/genangan yang digunakan adalah ketinggian 30 cm dengan waktu surut 60 menit, sehingga dari 68 titik genangan yang ada di Kota Bandung, pada tahun 2020 tercatat 22 titik genangan telah tertangani dan 46 titik genangan belum tertangani.

3.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka terkait infrastruktur telah diidentifikasi sebuah isu strategis dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yakni **Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang**.

Infrastruktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat

dengan pengendalian ruang wilayah. Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang yaitu:

1. **Peningkatan sarana prasarana penurunan genangan** untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
2. **Pengendalian kemacetan lalu lintas** pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti (1) Transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik (2) Pembangunan jalan layang (flyover) atau bahkan jalan bawah tanah (underpass) dan lain sebagainya.
3. **Kebutuhan peningkatan akses wisatawan** seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (world class city).

3.2.3 Visi, Misi dan Program

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018- 2023, yaitu: “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”.

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi, dimana tugas dan fungsi DPU berkaitan erat dengan misi keempat: *Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan*

Tabel 3.3 Keterkaitan Misi, Sasaran dan Program Prioritas Walikota Bidang Infrastruktur

Misi	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas
Program Pembangunan Daerah	Program Prioritas Kepala Daerah
Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Flyover / underpass Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik
Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Kolam/ Saluran Retensi
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	-
Penyelenggaraan LLAJ	-

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023

Terkait dengan Program Prioritas Kepala Daerah yang selaras dengan Program Pembangunan Daerah yang telah disebutkan di atas, berikut adalah target yang direncanakan untuk dicapai selama periode Perubahan RPJMD 2018-2023:

Tabel 3.4 Target Program Prioritas Kepala Daerah yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam RPJMD 2018-2023

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Satuan	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
	Pembangunan Flyover / underpass. Pembangunan flyover / underpass merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan di Kota Bandung, khususnya untuk mengurai kemacetan pada persimpangan yang sering mengalami kemacetan lalu lintas (bottlenecking). Sumber: Buku Bandung Urban Mobility Project.	unit	-	2	1	1	1
	Fasilitas Disabilitas di semua ruang publik. Fasilitas disabilitas adalah akses bagi penyandang cacat pada sarana dan prasarana umum. Fasilitas disabilitas berupa sarana prasarana, diantaranya jalan dan taman. Fasilitas disabilitas pada jalan, berupa fasilitas pejalan kaki/trotoar, diantaranya penyediaan ramp on/off (jalur khusus), ubin pemandu untuk aksesibilitas kaum difabel.	Ruas jalan	33	10	9	10	10
	Pembangunan Kolam/ Saluran Retensi. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.	kolam	3	1	1	1	1

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PUPR DAN RENSTRA DBMPR PROVINSI JAWA BARAT

3.3.1 Renstra Kementerian PUPR

Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, yakni Sasaran Strategis Pertama (SS-1) terkait sektor Sumber Daya Air dan Sasaran Strategis Kedua (SS-2) terkait sektor Bina Marga, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat; (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat; (3) Kapasitas tampung per kapita; (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

Tidak terdapat target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR 2020-2024 yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi faktor penghambat maupun pendukung pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, namun terdapat beberapa target yang relevan, yakni:

1. Bidang Sumber Daya Air
 - a. Peningkatan Kapasitas Daya Tampung dengan target 58,5 m³/kapita/tahun;
 - b. Pembangunan embung dengan target 500 unit;
 - c. Ketersediaan air baku dengan target 50 m³/detik;
 - d. Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai dengan target 2100 km;
2. Bidang Konektivitas
 - a. Pembangunan jalan baru dengan target 3000 km;
 - b. Pembangunan jembatan dengan target 38.328 m;
 - c. Pembangunan flyover/underpass dengan target 31.053 m.

Tidak ada target pembangunan infrastruktur Utama Kementerian PUPR yang beririsan langsung dengan target program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum baik pada bidang SDA maupun Konektivitas. Namun demikian, target bidang konektivitas dalam hal pembangunan flyover/underpass sangat relevan dengan program prioritas kepala daerah/janji wali kota yang tercantum dalam Perubahan RPJMD 2018-2023.

Pada Sasaran Pembangunan PN 1 dan PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024, terdapat satu indikator dan target yang relevan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, yakni sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah, pada indikator persentase kondisi mantap jalan kabupaten-kota dengan target 2024 sebesar 65%. Pada akhir 2020, tingkat kemantapan jalan mencapai 91,87%. Dengan demikian **Kota Bandung telah melampaui target kemantapan jalan kabupaten-kota** yang telah ditetapkan.

3.3.2 Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat

Tujuan Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatkan kinerja jaringan jalan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan.
2. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.
3. Mewujudkan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

1. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah
2. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat.
3. Meningkatnya kualitas sistem jasa konstruksi dan sumber daya manusia Jasa Konstruksi.
4. Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Terdapat 2 (dua) sasaran yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 3.5 Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah DBMPR Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah	Tingkat aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun	88,91	89,11	89,31	89,50	89,70
Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat	Tingkat kemandapan jalan	91,48	95,53	99,28	99,97	100

Sumber : Renstra DBMPR Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas, target tingkat kemandapan jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 95,53%. Capaian tingkat kemandapan jalan kota pada tahun 2020 adalah 91,87%. Dengan demikian tingkat kemandapan jalan kota yang ada saat ini belum setara dengan target tingkat kemandapan jalan yang ditetapkan pada tingkat provinsi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, memiliki kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) yaitu Inti Pusat Kota yang berada di Alun-alun untuk wilayah Bandung Barat dan Gedebage untuk wilayah Bandung Timur.
- b. Membagi wilayah kota menjadi 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), masing masing dilayani oleh satu pusat sekunder, terdiri dari pusat sekunder Setrasari, melayani WP Bojonegara; pusat sekunder Sadang Serang, melayani WP Cibeunying; Pusat Sekunder Kopo Kencana, melayani WP Tegalega; Pusat Sekunder Turangga, melayani WP Karees; Pusat Sekunder Arcamanik, melayani WP Ujungberung; dan Pusat Sekunder Margasari melayani WP Gedebage.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis

perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Berdasarkan tujuan dari penataan kota tersebut terdapat Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang, serta Kebijakan dan Strategi Pola Ruang seperti yang tercantum pada pasal 9 dan pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011.

Adapun kebijakan dan strategi struktur ruang yang merupakan bagian dari tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yaitu:

1. Kebijakan: Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Berbasis Transportasi Publik Yang Terpadu dan Terkendali. Strategi tersebut meliputi:
 - a. Membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi;
 - b. Mengawasi fungsi dan hirarki jalan;
 - c. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan.
2. Kebijakan: Peningkatan kualitas, kuantitas, keektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional. Strategi tersebut adalah meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan.
3. Kebijakan: Perwujudan Keseimbangan Proporsi Kawasan Lindung. Strategi tersebut adalah mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api.

Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas, maka dalam Rencana Struktur dan Pola Ruang menjabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Jaringan Prasarana Kota yang terdiri atas:

1. Rencana sistem prasarana utama, yaitu rencana sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - a. Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer;
 - b. Pemantapan hirarki jaringan jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer;
 - c. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder;
 - d. Pembangunan jalan layang;
 - e. Pembangunan jalan baru dan jalan tembus.
2. Rencana sistem prasarana lainnya, yaitu rencana sistem jaringan sumber daya air, yang meliputi:
 - a. Penataan Sungai Cikapundung;

- b. Penataan Wilayah Sungai Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane – Ciliwung – Citarum, khususnya dalam DAS Citarum;
 - c. pembangunan kolam parkir air (retension pond) dengan mengoptimalkan RTH sebagai wilayah resapan air di PPK Gedebage.
3. Rencana system prasarana lainnya, yaitu rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota, yang salah satunya adalah rencana sistem drainase kota, yang terdiri atas:
- a. Penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan *brandgang*;
 - b. Peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro;
 - c. Pengintegrasian sistem drainase dengan wilayah resapan; dan
 - d. Penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi di hulu sungai dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.
4. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki, terdiri atas:
- a. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan;
 - b. Penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya;
 - c. Penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan
 - d. Penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas – ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.

3.4.2 KLHS Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan

lingkungan hidup. Analisis yang dilakukan terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan data di Kota Bandung yang telah didapatkan dihasilkan masih ada beberapa indikator yang tidak tercapai, tidak ada target, dan tidak ada data, yaitu sebanyak 6 indikator yang kemudian menjadi arahan untuk Kebijakan, Rencana dan Program RPJMD Kota Bandung. Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dinas Pekerjaan Umum terlibat dalam TPB 6, Menjamin Air Bersih Berkelanjutan.

Kajian yang dilakukan terhadap capaian TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan terdapat indikator yang belum tercapai adalah masih rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Beberapa hambatan dan tantangan akan dihadapi dalam proses penyelesaiannya yang tertuang di dalam program pembangunan RPJMD Kota Bandung. Beberapa kompleksitas hambatan yang perlu dihadapi sebagai berikut:

- a. Daya dukung air sebagian besar sudah terlampaui.
- b. Daya dukung pangan sudah terlampaui, hanya 10% wilayah kota Bandung yang memiliki daya dukung pangan belum terlampaui yaitu wilayah yang berada pada bagian timur Kota Bandung yaitu Kec. Gede Bage, Kec. Panyileukan dan Kec. Cibiru. Sementara itu untuk mencapai penurunan tingkat kemiskinan dapat diukur melalui kecukupan pangan yang sudah mandiri.
- c. Beberapa sungai sudah tercemar berat.
- d. Rendahnya indeks kapasitas daerah terhadap bencana.
- e. Pembiayaan masih mampu untuk memenuhi belanja daerah dalam pembiayaan pembangunan, kecenderungan pendapatan lebih tinggi dibandingkan belanja serta surplus masih tinggi.

Rekomendasi arahan kebijakan dan program untuk mewujudkan TPB 6 yaitu Menjamin Air Bersih Berkelanjutan yang terkait dengan DPU adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi arahan kebijakan: Kerjasama perlindungan dan konservasi sumber air antar wilayah.
2. Rekomendasi kebijakan / program / rencana: (1) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); (2) Penyediaan embung dan bendungan baru dengan sumber air baku dari daerah lain.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari gambaran pelayanan perangkat daerah yang telah diuraikan pada Bab 2, dan sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, RTRW Kota Bandung, dan KLHS Kota Bandung, yang telah diuraikan pada sub bab

sebelumnya, dapat dirangkum faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 3.6 Review Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari hasil Telaahan Pustaka

Sumber Telaahan	Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	Belum tercapainya beberapa target kinerja perangkat daerah dan perlunya evaluasi dan penyesuaian indikator dan target kinerja
Renstra KemenPUPR	Telah tercapainya Sasaran Meningkatnya Konektivitas Wilayah, yakni target kemantapan jalan kabupaten-kota
Renstra DBMPR Jabar	Belum setaranya target tingkat kemantapan jalan kota dengan target tingkat kemantapan jalan yang ditetapkan pada jalan provinsi
RTRW Kota Bandung	Telah ditetapkan beberapa Rencana Struktur dan Pola Ruang sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana sistem jaringan transportasi darat 2. Rencana sistem jaringan sumber daya air 3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki
KLHS Kota Bandung	Adanya rekomendasi arah kebijakan Kerjasama perlindungan dan konservasi sumber air antar wilayah Adanya rekomendasi kebijakan / program / rencana: (1) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); (2) Penyediaan embung dan bendungan baru dengan sumber air baku dari daerah lain

Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan: i) gambaran pelayanan Perangkat Daerah, ii) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, iii) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan iv) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur kebinamargaan untuk peningkatan kemantapan jalan dan kualitas trotoar
2. Optimalisasi pengelolaan infrastruktur sumber daya air dan sistem drainase untuk penurunan genangan.

4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI KOTA BANDUNG

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2018-2023, maka Kota Bandung menetapkan Visi, yaitu:

“Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”.

Penjelasan Visi Kota Bandung adalah:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan

seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Untuk mewujudkan Visi Kota Bandung, dirumuskan 5 (lima) Misi, yaitu:

Visi Kota	Misi Kota
Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis	1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
	2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayanai, Efektif, Efisien, dan Bersih
	3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
	4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
	5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Misi Pertama: Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Misi Kedua: Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Misi Ketiga: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

Misi Keempat: Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Misi Kelima: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET			
			2020	2021	2022	2023	
Menurunnya Titik Kemacetan	Meningkatnya kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	91,87%	93%	94%	95%	
		Luas trotoar dalam kondisi baik	410145 m ²	420145 m ²	431045 m ²	441945 m ²	
		Cakupan PJU Menyala	90,96%	91,00%	n/a	n/a	
Menurunnya Genangan	Meningkatnya kapasitas resapan air, aliran sungai dan parkir air	Persentase Penurunan Titik Genangan	67,65%	58,82%	50,00%	41,18%	
	Meningkatnya kapasitas saluran drainase jalan	Persentase drainase dalam kondisi baik	63,02%	63,85%	64,68%	65,52%	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,01%	85,60%	85,70%	85,80%	

Metodologi Pengukuran indikator tujuan/sasaran perangkat daerah ini dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Formulasi pengukuran indikator sasaran

NO	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	$\frac{\text{panjang kondisi baik} + \text{panjang kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$
2	Luas trotoar dalam kondisi baik	m ²	Luas trotoar eksisting kondisi baik + luas trotoar eksisting dalam kondisi rusak yang direhabilitasi + luas trotoar baru yang dibangun
3	Cakupan PJU menyala	%	Jumlah PJU eksisting dalam kondisi menyala dibagi Jumlah PJU keseluruhan
4	Persentase penurunan titik genangan	%	Jumlah titik genangan eksisting yang belum tertangani dibagi total jumlah titik genangan yang telah ditetapkan untuk ditangani
	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	[Panjang drainase eksisting dalam kondisi baik + panjang drainase eksisting dalam kondisi rusak yang direhabilitasi + panjang drainase baru yang dibangun] dibagi total panjang jalan kota

5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

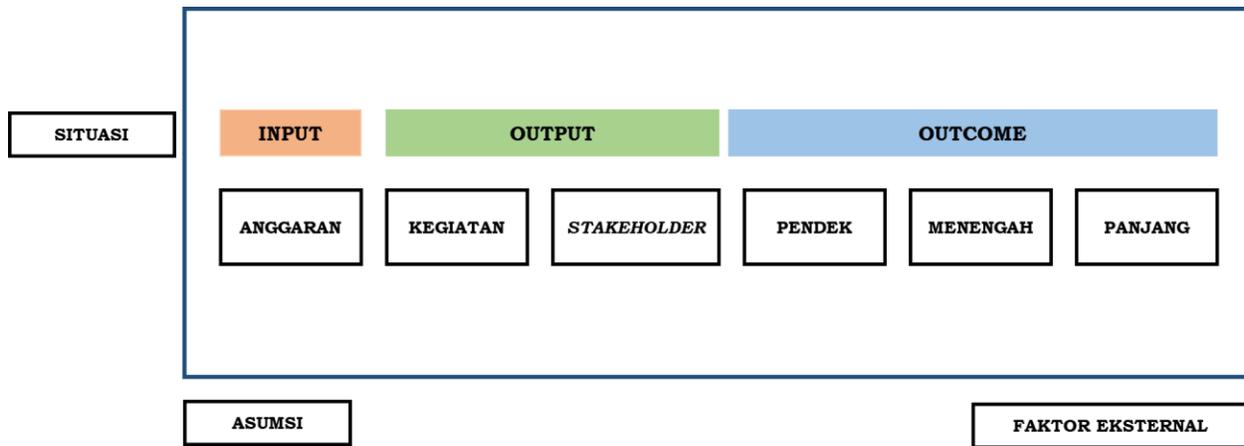
Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018-2023 yaitu analisis Logic Model atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. Logic model ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. Logic model adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.1 Logic Model

Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan short term outcome untuk strategi dan intermediate term outcome untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Logic Model.

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra maka dianggap strategis.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode Renstra perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI:	Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis
MISI:	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Titik Kemacetan	Meningkatnya kemantapan jalan	Meningkatkan kemantapan jalan	Perbaikan jalan rusak melalui rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan
			Mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap melalui pemeliharaan rutin jalan
		Meningkatkan pelayanan trotoar yang inklusif	Pemerataan ketersediaan fasilitas pejalan kaki melalui pembangunan trotoar di jalan-jalan utama
			Perbaikan dan peningkatan kualitas trotoar melalui rehabilitasi dan revitalisasi trotoar
		Meningkatkan cakupan PJU menyala	Pemenuhan kebutuhan PJU memadai melalui pembangunan PJU
			Perbaikan PJU padam melalui pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin
Menurunnya Genangan	Meningkatnya kapasitas resapan air,	Meningkatkan kapasitas resapan air,	Peningkatan kapasitas sungai melalui pembangunan dan rehabilitasi tanggul dan tebing sungai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	aliran sungai dan parkir air	aliran sungai dan parkir air	Pengembalian kapasitas sungai melalui pengerukan dan OP Sungai
			Peningkatan kapasitas resapan melalui revitalisasi kawasan resapan dan pembuatan sumur resapan
			Peningkatan kapasitas parkir air melalui pembangunan kolam retensi
			Peningkatan kapasitas redistribusi genangan melalui pembangunan rumah pompa
	Meningkatnya kapasitas saluran drainase jalan	Meningkatkan kapasitas saluran drainase jalan	Peningkatan kapasitas saluran melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase jalan
			Pengembalian kapasitas saluran melalui pengerukan dan OP saluran drainase
			Pengembalian fungsi tali-tali air melalui perbaikan dan OP tali-tali air
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan dan pengembangan aplikasi pelayanan publik yang interaktif

Keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Renstra dapat dilihat pada logic model yang tercantum pada tabel di bawah ini.

VISI	TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS								
MISI	MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN								
ISU STRATEGIS RPJMD	OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG				TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
TUJUAN RPJMD	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN				TERLAKSANANYA REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				
	Indeks Liveable City aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur (Poin)				Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)				
	Kondisi Awal NA (2020) menjadi 8,00 (2023)				Kondisi Awal: 71,75 (2020) Menjadi 70,13 (2023)				
SASARAN RPJMD = TUJUAN RENSTRA	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KOTA TERPADU DAN BERKUALITAS				MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH				
	Persentase Penurunan Kemacetan		Persentase Penurunan Titik Genangan		Indeks Kepuasan Masyarakat				
	Kondisi Awal 24,35% (2020) menjadi 7,83% (2023)		Kondisi Awal 67,65% (2020) Menjadi 41,18% (2023)		Kondisi Awal 83,01% (2020) Menjadi 85,80% (2023)				
STRATEGI RPJMD = SASARAN RENSTRA	MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN		MENURUNNYA GENANGAN			MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			
	Tingkat Kemantapan Jalan		Persentase Penurunan Titik Genangan			Indeks Kepuasan Masyarakat			
	Kondisi Awal 91,87% (2020) Menjadi 95,00% (2023)		Kondisi Awal 67,65% (2020) Menjadi 41,18% (2023)			Kondisi Awal 83,01% (2020) Menjadi 85,80% (2023)			
ARAH KEBIJAKAN RPJMD	MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN		MENINGKATNYA KAPASITAS RESAPAN AIR, ALIRAN SUNGAI, DAN PARKIR AIR			MENINGKATNYA KAPASITAS SALURAN DRAINASE JALAN	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS		
	Tingkat Kemantapan Jalan		Persentase Penurunan Titik Genangan			persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat		
	Kondisi awal 91,87% (2020) Menjadi 95,00% (2023)		kondisi awal 67,65% (2020) menjadi 41,18% (2023)			Kondisi awal 63,02% (2020) menjadi 65,52% (2023)	Kondisi Awal 83,01% (2020) Menjadi 85,80% (2023)		
KEBIJAKAN RPJMD = PROGRAM RENSTRA	PROGRAM PENYELENGGARAAN LLAJ	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH	
	MENINGKATNYA CAKUPAN PJU MENYALA	MENINGKATNYA KUALITAS TROTOAR	MENINGKATNYA KEMANTAPAN JALAN	MENINGKATNYA KAPASITAS RESAPAN AIR, ALIRAN SUNGAI, DAN PARKIR AIR			MENINGKATNYA KAPASITAS SALURAN DRAINASE JALAN	TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS	
	Cakupan PJU Menyala	Luas Trotoar dalam kondisi baik	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persentase kapasitas Sumur Imbuhan	Panjang sungai dalam kondisi baik	Persentase Kapasitas Parkir Air (Kolam Retensi)	persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat
	kondisi awal 90,96% (2020) menjadi 91% (2021)	kondisi awal 410145 m2 (2020) menjadi 441945 m2 (2023)	kondisi awal 91,87% (2020) menjadi 95% (2023)	kondisi awal 67,65% (2020) menjadi 41,18% (2023)	kondisi awal 0,73% (2020) menjadi 3,06% (2023)	kondisi awal - (2020) menjadi 265,05 km (2023)	kondisi awal 26,69% (2020) menjadi 72,01% (2023)	kondisi awal 63,02% (2020) menjadi 65,52% (2023)	kondisi awal 83,01% (2020) menjadi 85,80% (2023)

Gambar 5.2 Logic Model Perubahan Renstra 2018-2023

6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.

Secara garis besar direncanakan beberapa program yang utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi kota melalui sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada Tabel 6.1 disampaikan realisasi rencana strategis 2018-2023 periode 2019-2020. Pada Tabel 6.2 disampaikan mengenai detail perubahan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung selama 3 tahun ke depan.

Tabel 6.1 Realisasi Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 2019-2020

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2019		2020		Unit Kerja
		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	
			272.586.356.766		172.722.469.323	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.591.688.072	93,85 %	7.747.074.893	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik bulanan	12 laporan	1.160.494.098	12 Bulan	1.231.182.980	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	12 laporan	569.316.000	12 Bulan	551.278.200	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor tersedia	12 laporan	1.609.014.000	12 Bulan	1.571.707.400	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja diperbaiki	510 Unit	202.937.000	118 Unit	184.021.240	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor tersedia	12 laporan	522.454.200	12 Bulan	526.865.050	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	26 jenis	497.554.150	29 jenis	558.630.300	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor tersedia	12 laporan	135.393.500	12 Bulan	177.133.000	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kebutuhan peralatan rumah tangga tersedia	12 laporan	874.081.100	12 Bulan	661.605.800	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	12 laporan	452.019.000	12 Bulan	288.137.000	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kebutuhan makanan dan minuman tersedia	12 laporan	280.847.650	12 Bulan	207.431.500	Sekretariat
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk rapat dan konsultasi luar daerah tersedia	12 laporan	694.168.174	12 Bulan	123.756.023	Sekretariat
Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jasa Pengamanan Kantor Tersedia	12 laporan	1.593.409.200	12 Bulan	1.665.326.400	Sekretariat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.582.485.193	86,47 %	5.712.373.625	
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	4.401.020.509			Sekretariat
	Jumlah terpelihara Kendaraan Dinas/Operasional	84 Unit				Sekretariat
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	24 Unit	149.116.000	25 Unit	345.620.000	Sekretariat
Kegiatan Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	184 Buah	76.813.000	135 Buah	588.465.900	Sekretariat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dan prasarana terpelihara dengan baik	12 laporan	2.955.535.684	12 bulan	1.038.464.939	Sekretariat
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara			80 Unit	3.638.022.786	Sekretariat
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dihasilkan			8 Paket	101.800.000	Sekretariat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.181.719.000	118,8 %	68.200.000	
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	720 Stel	555.786.000	-	-	Sekretariat
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1135 Stel	625.933.000	297 Stel	68.200.000	Sekretariat
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			2.905.052.274			
Kegiatan Pembangunan Jalan			2.905.052.274			Bidang Pembangunan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong			16.810.579			
Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong			16.810.579			Bidang Pemeliharaan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			21.252.022.436			
Kegiatan Peningkatan Jalan Seajar Rel (Banprov)	Meningkatnya struktur/kapasitas jalan	8988 M2	8.425.522.000			Bidang Pembangunan
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan			14.390.858			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Peningkatan Jalan Seajar Tol sampai GBLA (Banprov)	Meningkatnya struktur/kapasitas jalan	10860 M2	12.812.109.578			Bidang Pembangunan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			870.644.699			
Kegiatan Normalisasi Sungai Cipamokolan (Banprov)			477.533.685			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Normalisasi Sungai Cidurian (Banprov)			145.201.316			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Normalisasi Sungai Citepus (Banprov)			247.909.698			Bidang Pemeliharaan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya			81.006.700			
Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau			81.006.700			Bidang Pemeliharaan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2019		2020		Unit Kerja
		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	
Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum			4.989.731.009			
Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)			4.989.731.009			Bidang Pembangunan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum			137.345.049.598			
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan seraca Kontraktual dalam kondisi mantap	51955 meter	41.130.279.024			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Titik Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik	7750 Titik	5.551.086.843			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sumber daya air dalam kondisi baik	15520 m1	52.237.124.803			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Jalan dan Trotoar	Panjang minimal Drainase dan trotoar dalam kondisi baik	6241.9 m	3.843.318.840			Bidang Pemeliharaan
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	Jumlah laporan terpeliharanya Alat-Alat Ukur dan Laboratorium Bahan kondisi baik	12 laporan	587.618.761			UPT LBK
Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Terpeliharanya peralatan, kendaraan operasional lapangan, alat berat dalam kondisi baik	142 Buah	3.984.735.549			UPT Alkel
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	Terpeliharanya Daerah Aliran Sungai dalam kondisi Baik	198518.99 m	9.589.320.340			UPT DAS
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	18976.45 m2	2.704.500.930			UPT Bojonagara
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	33920 m2	3.028.031.475			UPT Cibeunying
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	Panjang Saluran Drainase Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega	9957 ml	2.592.477.650			UPT Tegallega
	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega	24241 m2				
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	31306 m2	2.729.098.750			UPT Karees
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	22035 m2	2.403.748.630			UPT Ujungberung
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	Terpeliharanya Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	41144.97 M2	2.690.696.373			UPT Gedebage
Kegiatan Peningkatan Jalan Insidentil	Terpeliharanya Jalan secara Insidentill dalam kondisi baik	39369.71 m2	4.273.011.630			UPT PCA
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum			6.047.029.389			Bgdmo Perencanaan
Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	Jumlah Dokumen acuan rencana kerja strategi dan kebijakan kedinasan	19 Dokumen	679.205.700			Bidang Perencanaan
Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan penerangan Jalan Umum	17 Dokumen	1.320.757.210			Bidang Perencanaan
Kegiatan Perencanaan Prasarana Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Sumber Daya Air	18 Dokumen	1.511.977.866			Bidang Perencanaan
Kegiatan Perencanaan Trotoar dan Drainase Jalan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Trotoar dan Drainase Jalan	14 Dokumen	743.998.083			
Kegiatan Perencanaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen acuan Kerja Pelaksanaan Jalan dan Jembatan	24 Dokumen	1.791.090.530			UPT PCA
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum			81.723.117.817			Bgdmo Pembangunan
Kegiatan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	1559.85 m1	4.865.711.866			Bidang Pembangunan
Kegiatan Pembangunan Trotoar dan Drainase Jalan	Luas trotoar terbangun	11283.5 m2	22.591.281.666			Bidang Pembangunan
	Panjang Drainase jalan terbangun	1022.44 m1				
Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya struktur/kapasitas jalan	28985 m2	25.251.947.431			Bidang Pembangunan
Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU Terbangun	1600 Titik	29.014.176.854			Bidang Pembangunan
Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	-			46199,31 m2	5.821.685.500	
Kegiatan Pendukung konektivitas (DAK)				7 paket	5.821.685.500	Bidang Pembangunan
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Panjang drainase jalan dalam kondisi baik			1329,5 m	91.208.302.338	
	Luas trotoar dalam kondisi baik			2792,63 m2		
	jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (fly over / under pass)			2 Buah		
	persentase panjang jalan dalam kondisi mantap			91,87 %		
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara			16547,9 M2	4.596.391.670	UPT Bojonagara
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara			35337 m1		
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying			23000 m2	5.059.142.540	UPT Cibeunying
	Luas saluran jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying			12000 M2		
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage			16895 m2	4.578.100.590	UPT Gedebage
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage			12630 M1		
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees			14355 M2	4.597.268.535	UPT Karees

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2019		2020		Unit Kerja
		Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees			25953 m		UPT Tegallega
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega			17728 M2	4.420.184.800	
	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega			22105 M		
Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung			17955 m2	4.274.803.040	UPT Ujungberung
	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Ujungberung			10083		
Kegiatan Perencanaan Kebinamargaan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan trotoar/drainase jalan yang dihasilkan			15 Paket	1.959.093.250	Bidang Jalan dan Jembatan
	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan jalan dan jembatan yang dihasilkan			26 Paket		
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan	Panjang drainase jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual			1329,5 m	49.482.014.608	Bidang Jalan dan Jembatan
	luas trotoar terbangun dan terpelihara secara kontraktual			2792,63 M2		
	Luas perkerasan jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual			224219 M2		
Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi /Pemeliharaan peralatan dan Perbengkelan	Jumlah peralatan perbengkelan terpelihara			22 Unit	4.827.572.310	UPT Alkel
Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang dihasilkan			13 Paket	818.731.600	Bidang Jalan dan Jembatan
Kegiatan Produksi Campuran Aspal (PCA) Jalan	luas jalan yang dipelihara dari produksi campuran aspal			44147,45 M2	5.642.116.240	UPT PCA
Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah paket pengadaan peralatan pendukung kegiatan			4 Paket	344.303.205	UPT LBK
Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang dihasilkan			11 Paket	608.579.950	Bidang Jalan dan Jembatan
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	jumlah PJU dalam kondisi baik			3795 titik	16.548.187.591	
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU eksisting			3795 Titik	15.066.455.391	Bidang PJU
Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang dihasilkan			8 Paket	572.561.500	Bidang PJU
Kegiatan Perencanaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan penerangan jalan umum yang dihasilkan			17 Paket	909.170.700	Bidang PJU
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	lama genangan yang tertangani pada titik genangan			60 menit	45.616.645.376	
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang TPT terbangun dan terpelihara secara kontraktual			6224 m1	32.362.313.664	Bidang SDA
	Panjang pagar pengaman sungai terbangun dan terpelihara			848,1 m1		Bidang SDA
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	Luas Daerah Aliran Sungai yang dipelihara			189708,74 M2	9.692.121.962	UPT DAS
Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan yang dihasilkan			31 Paket	1.201.770.000	Bidang SDA
Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Air	Jumlah paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan sarana/prasarana sumber daya air yang dihasilkan			34 Paket	2.360.439.750	Bidang SDA
				272.586.356.766	172.722.469.323	

Sumber : Hasil Perhitungan dan Analisa dan Merujuk pada Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung 2021-2023

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	297.719.224.528	100 %	258.189.068.250	100 %	284.007.974.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			8 dokumen	342.060.400	8 dokumen	376.266.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan disusun			8 dokumen	342.060.400	8 dokumen	376.266.000	Sekretariat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan	100 %	38.884.173.139	100%	40.455.093.734	100%	44.500.603.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 laporan	38.884.173.139					Sekretariat
	Jumlah Pelayanan gaji dan tunjangan Perangkat Daerah bulanan			12 bulan	40.455.093.734	12 bulan	44.500.603.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100 %	898.782.500	100%	939.922.500	100%	1.033.915.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	400 stel	566.060.000					Sekretariat
	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana disiplin pegawai			4 laporan	605.528.000	4 laporan	666.081.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	332.722.500					Sekretariat
	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1 laporan	334.394.500	1 laporan	367.834.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.862.250.281	100%	4.132.894.005	100%	4.546.186.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	182.083.616					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor bulanan			12 laporan	188.091.376	12 laporan	206.901.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	1.206.044.980					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor triwulanan			4 laporan	1.175.700.460	4 laporan	1.293.271.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	812.431.840					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga triwulanan			4 laporan	734.217.770	4 laporan	807.640.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	231.524.700					Sekretariat
	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman			100%	485.210.000	100%	533.731.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	687.081.575					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bulanan			12 laporan	639.881.439	12 laporan	703.870.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	311.793.570					Sekretariat
	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan atau Peraturan Perundang - Undangan bulanan			12 laporan	319.572.000	12 laporan	351.529.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	431.290.000					Sekretariat
	Cakupan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur			100%	399.405.000	100%	439.346.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pengadaan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			1 laporan	190.815.960	1 laporan	209.898.000	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100 %	1.058.282.702	100%	870.127.291	100%	957.140.000	
Pengadaan Mebel	Cakupan Pengadaan Mebel	100 %	659.455.702					Sekretariat
	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel			1 laporan	242.991.001	1 laporan	267.290.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	398.827.000					Sekretariat
	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin			1 laporan	229.380.800	1 laporan	252.319.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin			1 laporan	397.755.490	1 laporan	437.531.000	UPT Peralatan dan Perbengkelan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.309.635.760	100%	5.384.460.400	100%	5.922.906.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	1.520.472.800					Sekretariat
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulanan			48 bulan	1.520.472.800	48 bulan	1.672.520.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	1.972.307.040					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24 bulan	1.928.124.000	24 bulan	2.120.936.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	1.816.855.920					Sekretariat
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 bulan	1.935.863.600	12 bulan	2.129.450.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %	11.680.602.321	100%	11.389.238.198	100%	12.528.163.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	4.564.112.300					Sekretariat
	Jumlah jasa Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan triwulanan			4 jasa	4.149.055.940	4 jasa	4.563.962.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah peralatan/kendaraan operasional dipelihara	65 unit	5.562.342.868					UPT Peralatan dan Perbengkelan
	Persentase Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara			100%	5.364.031.498	100%	5.900.435.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kerja tersedia	12 bulan	326.007.000					Sekretariat
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 laporan	405.075.000	4 laporan	445.583.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	1.228.140.153					Sekretariat
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 laporan	1.471.075.760	12 laporan	1.618.183.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase penurunan titik genangan	58,82%	59.267.241.080	50,00%	59.462.215.503	41,18%	65.408.436.000	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan SDA	100 %	59.267.241.080	100%	59.462.215.503	100%	65.408.436.000	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Banyaknya Dokumen Perencanaan Sumber Daya Air yang dihasilkan			150 dokumen	2.000.000.000	150 dokumen	2.200.000.000	Bidang Pengendalian Daya Rusak Air
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan disusun	15 dokumen	1.153.225.600					Bidang Sumber Daya Air
	Banyaknya Dokumen Perencanaan Sumber Daya Air yang dihasilkan			12 dokumen	700.066.620	12 dokumen	770.073.000	Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Banyaknya Sumur Resapan Dalam Yang Terbangun Dalam 1 Tahun			10 titik	3.400.000.000	10 titik	3.740.000.000	Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Banyaknya Sumur Resapan Dangkal Yang Terbangun Dalam 1 Tahun			100 titik		100 titik		
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Banyaknya Rumah Pompa Terbangun Dalam 1 Tahun			1 unit	1.500.000.000	1 unit	1.650.000.000	Bidang Pengendalian Daya Rusak Air
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi dibangun	1 unit	9.200.419.000					Bidang Pengendalian Daya Rusak Air
	Banyaknya Kolam Retensi Terbangun Dalam 1 Tahun			1 unit	6.000.000.000	1 unit	6.600.000.000	
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang pagar pengaman sungai terpasang	2968 m1	33.848.334.344					Bidang Pengendalian Daya Rusak Air
	Panjang Tanggul Sungai direhabilitasi	4100 m1						
	Panjang Tanggul Sungai Yang di Rehabilitasi Dalam 1 Tahun			3600 m1	30.942.139.442	3600 m1	34.036.353.000	
Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air terbangun	6 unit	6.617.036.675					Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Banyaknya Mata Air yang diindungi			4 titik	4.565.658.479	4 titik	5.022.224.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	125000 m1	8.448.225.461					UPT Daerah Aliran Sungai
	Panjang daerah aliran sungai dipelihara			85000 m1	8.448.225.452	85000 m1	9.293.048.000	
	Panjang TPT dibangun			180 m1		180 m1		
	Volume bronjong dipasang			380 m3		380 m3		
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Banyaknya Dokumen Pengawasan dan Rekomtek Sumber Daya Air yang dihasilkan			12 dokumen	300.298.200	12 dokumen	330.328.000	Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air
	Banyaknya Dokumen Pengawasan dan Rekomtek Sumber Daya Air yang dihasilkan			150 dokumen	1.605.827.310	150 dokumen	1.766.410.000	Bidang Pengendalian Daya Rusak Air
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	63.85 %	42.783.389.193	65%	29.926.289.679	65,52%	32.918.917.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Sistem Drainase	100 %	42.783.389.193	100%	29.926.289.679	100%	32.918.917.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan disusun	12 dokumen	751.471.600					Bidang Sumber Daya Air
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase disusun			8 dokumen	683.442.100	8 dokumen	751.786.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi disusun	5 dokumen	714.979.500					Bidang Sumber Daya Air
	Jumlah dokumen supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase disusun			10 dokumen	683.442.100	10 dokumen	751.786.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase dibangun	17200 m1	30.431.689.730					Bidang Sumber Daya Air
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase direhabilitasi			10000 m1	17.229.867.676	10000 m1	18.952.854.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara	24000 m1	2.106.190.774					UPT Bojonagara
	Jumlah drum pori dibuat			350 titik	2.035.618.553	350 titik	2.239.180.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			430 buah		430 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			25000 m1		25000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			76 m3		76 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			4968.75 m3		4968.75 m3		
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega	16000 m1	1.478.537.378					UPT Tegallega
	Jumlah drum pori dibuat			250 titik	2.043.849.682	250 titik	2.248.235.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			300 buah		300 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			18000 m1		18000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			200 m3		200 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			4320 m3		4320 m3		
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees	12000 m1	1.951.375.476					UPT Karees
	Jumlah drum pori dibuat			300 titik	1.951.375.476	300 titik	2.146.513.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			300 buah		300 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			14000 m1		14000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			192 m3		192 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			3360 m3		3360 m3		
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung	19000 m1	1.712.924.004					UPT Ujungberung

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jumlah drum pori dibuat			500 titik	1.712.543.014	500 titik	1.883.797.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			100 buah		100 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			19000 m1		19000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			32 m3		32 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			4275 m3		4275 m3		
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage	18000 m1	1.542.251.920					UPT Gedebage
	Jumlah drum pori dibuat			350 titik	1.542.251.917	350 titik	1.696.477.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			600 buah		600 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			25000 m1		25000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			208 m3		208 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			2400 m3		2400 m3		
	Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying	18000 m1	2.093.968.811					UPT Cibeunying
	Jumlah drum pori dibuat			0 titik	2.043.899.161	0 titik	2.248.289.000	
	Jumlah plat beton penutup saluran diperbaiki			150 buah		150 buah		
	Panjang saluran dipelihara rutin			21000 m1		21000 m1		
	Volume kirmir saluran diperbaiki			44.8 m3		44.8 m3		
	Volume sedimentasi saluran dikeruk			4725 m3		4725 m3		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kematapan jalan	93 %	92.818.206.770	94%	105.286.766.540	95%	115.815.442.000	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota	100 %	92.818.206.770	100%	105.286.766.540	100%	115.815.442.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan disusun	28 dokumen	1.936.698.765					Bidang Jalan dan Jembatan
	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan disusun			20 dokumen	1.400.000.000	20 dokumen	1.540.000.000	
	Jumlah dokumen perencanaan trotoar disusun			12 dokumen	683.442.100	12 dokumen	751.786.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Pembangunan Jalan	Luas trotoar terbangun	25500 m2	20.832.035.844					Bidang Jalan dan Jembatan
	Luas separator jalan terbangun			500 m2	600.000.000	500 m2	660.000.000	
	Jumlah pengadaan aksesoris trotoar untuk pembangunan trotoar			2 jenis	749.086.800	2 jenis	823.995.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan direhabilitasi	1000 m1	2.000.000.000					Bidang Jalan dan Jembatan
	Luas trotoar direhabilitasi			15700 m2	18.829.837.802	15700 m2	20.712.822.000	Bidang Drainase dan Trotoar
	luas perkerasan jalan yang direhabilitasi secara swakelola	42000 m2	6.428.563.154	35000 m2	6.428.563.122	35000 m2	7.071.419.000	UPT Produksi Campuran Aspal
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan dipelihara berkala	18000 m1	32.293.741.491					Bidang Jalan dan Jembatan
	Luas perkerasan jalan dipelihara berkala			189000 m2	46.088.155.872	189000 m2	50.696.971.000	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Luas trotoar dipelihara rutin			1200 m2	2.080.776.137	1200 m2	2.288.854.000	Bidang Drainase dan Trotoar
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara	18000 m2	2.680.109.262					UPT Bojonagara
	Luas trotoar yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara	900 m2						
	Luas kerb dipelihara dengan pengecatan			2500 m2	2.979.879.901	2500 m2	3.277.868.000	
	Luas paving block trotoar diperbaiki			900 m2		900 m2		
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			18000 m2		18000 m2		

Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Panjang kerb/kanstin diperbaiki			180 m1		180 m1		UPT Tegallega
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega	22000 m2	3.695.279.473					
	Luas trotoar yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega	2000 m2						
	Luas paving block trotoar diperbaiki			500 m2	3.129.967.128	500 m2	3.442.964.000	
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			19000 m2		19000 m2		
	Panjang kerb/kanstin diperbaiki			600 m1		600 m1		UPT Karees
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees	24000 m2	3.580.142.155					
	Luas trotoar yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees	1900 m2						
	Luas paving block trotoar diperbaiki			900 m2	3.580.142.094	900 m2	3.938.156.000	
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			15000 m2		15000 m2		
	Panjang kerb/kanstin diperbaiki			218 m1		218 m1		UPT Ujungberung
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung	22000 m2	3.225.650.030					
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			22000 m2	3.225.631.631	22000 m2	3.548.195.000	
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage	24000 m2	3.639.811.269					UPT Gedebage
	Luas trotoar yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage	600 m2						
	Luas paving block trotoar diperbaiki			500 m2	3.639.807.451	500 m2	4.003.788.000	
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			25000 m2		25000 m2		
	Panjang kerb/kanstin diperbaiki			360 m1		360 m1		
	Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying	22000 m2	2.891.675.182					UPT Cibeunying
	Luas paving block trotoar diperbaiki			500 m2	2.941.744.828	500 m2	3.235.919.000	
	Luas perkerasan jalan dipelihara rutin			25000 m2		25000 m2		
	Panjang kerb/kanstin diperbaiki			230 m1		230 m1		
Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan dilebarkan	1 unit	2.000.000.000					Bidang Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan direhabilitasi	1 unit	5.000.000.001	1 unit	6.000.000.000	1 unit	6.600.000.000	Bidang Jalan dan Jembatan
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi disusun	12 dokumen	1.568.387.500					Bidang Jalan dan Jembatan
	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaan jalan dan jembatan disusun			20 dokumen	1.200.000.000	20 dokumen	1.320.000.000	Bidang Jalan dan Jembatan
	Jumlah dokumen pengawasan pekerjaan trotoar disusun			12 dokumen	683.442.100	12 dokumen	751.786.000	Bidang Drainase dan Trotoar
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang diuji	140 paket	1.046.112.644	100 paket	1.046.289.574	100 paket	1.150.919.000	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah PJU dalam kondisi baik	530 titik	41.156.660.782					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan kota	100 %	41.156.660.782			-	-	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian PJU	6 dokumen	27.578.240.910					Bidang Penerangan Jalan Umum
	Jumlah dokumen perencanaan PJU	6 dokumen						
	Jumlah PJU terbangun	746 titik						
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU dipelihara	49 titik	2.724.973.130					Bidang Penerangan Jalan Umum

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	2021		2022		2023		Unit Kerja
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Bojonagara	1960 titik	2.117.729.231					UPT Bojonagara
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Tegallega	400 titik	1.560.391.023					UPT Tegallega
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Karees	300 titik	1.658.798.977					UPT Karees
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Ujungberung	300 titik	1.712.229.827					UPT Ujungberung
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Gedebage	500 titik	1.615.402.723					UPT Gedebage
	Jumlah PJU dipelihara secara swakelola di wilayah Cibeunying	300 titik	2.188.894.961					UPT Cibeunying
			297.719.224.528		258.189.068.250		284.007.974.000	

Sumber : Hasil Perhitungan dan Analisa dan Merujuk pada Perubahan RPJMD 2018-2023, 2021

7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pada bagian ini akan disampaikan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang telah disusun pada bagian sebelumnya, yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung. Indikator kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A	RENSTRA								
1	Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dalam kondisi baik	%	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
2	Prosentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di Implementasikan	%	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
3	Prosentase Sarana dan Prasaran Pekerjaan Umum terbangun	%	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	92	n/a	91,87	n/a	n/a	n/a	91,87
5	Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/ underpass)	Bh	3	n/a	1	n/a	n/a	n/a	4
6	Luasan trotoar dalam kondisi baik	m2	397535	9817	2793	n/a	n/a	n/a	410145
7	Panjang drainase dalam kondisi baik	M1	602402	1032	1330	n/a	n/a	n/a	604763
8	Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	120	63,3	60,76	n/a	n/a	n/a	60,76
9	Jumlah PJU dalam kondisi baik	titik	43466	1613	1177	492	n/a	n/a	46548
B	PERUBAHAN RENSTRA								
1	Tingkat kemantapan jalan	%	91,87	n/a	91,87	93	94	95	95
2	Luas trotoar dalam kondisi baik	m2	397535	407352	410145	420145	431045	441945	441945
3	Cakupan PJU menyala	%	n/a	n/a	90,98	91,00	n/a	n/a	n/a
4	Persentase Penurunan Titik Genangan	%	67,65	n/a	67,65	58,82	50	41,18	41,18
5	Persentase kapasitas sumur imbuhan	%	n/a	n/a	0,73	1,60	2,33	3,06	3,06
6	Panjang sungai dalam kondisi baik	Km	n/a	n/a	n/a	125,00	250,00	265,05	265,05
7	Persentase kapasitas parkir air (kolam retensi)	%	n/a	n/a	26,69	31,13	51,88	72,01	72,01
8	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	63,02	n/a	63,02	63,85	64,68	65,52	65,52

Penjelasan pengukuran masing-masing indikator ini ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Pengukuran Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No (1)	Indikator (2)	Pengukuran Indikator (3)
	RENSTRA	
1	Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dalam kondisi baik Satuan: persen	Nilai rata-rata persentase capaian kegiatan pada Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum
2	Prosentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di Implementasikan Satuan: persen	Nilai rata-rata persentase capaian kegiatan pada Program Perencanaan Pekerjaan Umum
3	Prosentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum terbangun Satuan: persen	Nilai rata-rata persentase capaian kegiatan pada Program Pembangunan Pekerjaan Umum
4	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap Satuan: persen	$\frac{\text{panjang kondisi baik} + \text{panjang kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$
5	Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (flyover/ underpass) Satuan: buah	Jumlah flyover terbangun + jumlah underpass terbangun
6	Luasan trotoar dalam kondisi baik Satuan: m ²	Luas trotoar terbangun + luas trotoar terpelihara
7	Panjang drainase dalam kondisi baik Satuan: m ¹	Panjang drainase terbangun + panjang drainase terpelihara
8	Lama Genangan yang tertangani pada titik genangan Satuan: menit	$\frac{\text{Jumlah lama genangan}}{\text{Jumlah titik genangan}}$
9	Jumlah PJU dalam kondisi baik Satuan: titik	Jumlah PJU terbangun + jumlah PJU terpelihara
	PERUBAHAN RENSTRA	
1	Tingkat kemantapan jalan Satuan: %	$\frac{\text{panjang kondisi baik} + \text{panjang kondisi sedang}}{\text{Panjang jalan kota}} \times 100\%$
2	Luas trotoar dalam kondisi baik Satuan: m ²	Luas trotoar terbangun + luas trotoar terpelihara
3	Cakupan PJU menyala Satuan: %	$\frac{\text{Jumlah PJU eksisting dalam kondisi menyala}}{\text{Jumlah PJU keseluruhan}} \times 100\%$
4	Persentase Penurunan Titik Genangan Satuan: %	$\frac{\text{Sisa titik genangan yang belum ditangani}}{68 \text{ titik genangan yang sudah ditetapkan}} \times 100\%$
5	Persentase kapasitas sumur imbuhan Satuan: %	$\frac{\text{Jumlah sumur imbuhan terbangun}}{\text{Jumlah sumur imbuhan dibutuhkan}} \times 100\%$
6	Panjang sungai dalam kondisi baik Satuan: km	Jumlah panjang sungai eksisting dalam kondisi baik ditambah jumlah panjang sungai dalam kondisi rusak diperbaiki
7	Persentase kapasitas parkir air (kolam retensi) Satuan: %	$\frac{\text{Volume kolam retensi terbangun}}{\text{Volume kolam retensi dibutuhkan}} \times 100\%$
8	Persentase drainase dalam kondisi baik Satuan: %	$\frac{\text{Panjang drainase jalan eksisting dalam kondisi baik}}{\text{Panjang kebutuhan drainase jalan sesuai SK Jalan}} \times 100\%$

8 PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis DPU Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman dan tujuan ASN DPU Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis ini berisi penjabaran dari tujuan dan sasaran DPU yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Perubahan Rencana Strategis DPU Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dan landasan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan DPU Kota Bandung sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis DPU Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.”

Bandung, Desember 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bandung,

Ir. DIDI RUSWANDI, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001